Edisi 57 | Oktober 2026
32 Halaman

Total Banten

bicara data, bicara fakta



TUNJANGAN GEDE 'NGOPI' SAAT APEL

Hak keuangan besar yang diterima aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tampaknya belum berbanding lurus dengan tingkat kedisiplinan. Sebab masih banyak ditemukan pegawai yang justru duduk, ngopi hingga bermain gawai saat apel Hari Kesaktian Pancasila berlangsung, pada 1 Oktober 2026. Hal itu ditemukan oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) Disiplin Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten.

WARGA MISKIN PANDEGLANG TAK TERSENTUH BANTUAN

Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Pandeglang, Banten, belum menjangkau seluruh warga yang membutuhkan hingga awal Oktober 2026. Realisasi belanja bansos baru mencapai 66 persen, sementara Dinas Sosial (Dinsos) mengakui masih banyak masyarakat yang belum terjangkau bantuan pemerintah.

Harga Rp50.000,-

DAFTAR ISI

2 **EDITORIAL;**
- Banten dan Perjalanan yang Belum Tuntas

5 **LAPORAN UTAMA;**
- HUT ke-26 Banten Antara Capaian Pembangunan dan

7-8 **PEMBANGUNAN;**
- Ratu Zakiyah Pamer Capaian Program

9 **INSIDEN;**
- Gedung Pengadilan Agama Terbakar

10/12 **SOROTAN/SOSIAL;**
- ASN Banten 'Ngopi' saat Apel
- Warga Miskin Pandeglang Belum Tersentuh Bantuan
- BPS; Pandeglang Juara Perokok

14 **POLITIK;**
- Golkar Panaskan Mesin Partai

15-16 **HUMANIORA;**
- Pelajar Peragakan Jurus Silat Benteng di Kota Tangerang
- Aksi Nyata Ketua DPRD Kota Serang

17/18 **SOSOK/HUKRIM;**
- Putra Dinasti Jayabaya Masuk Bursa Kadin
- Direktur PT PMT Minta Dibebaskan

19 **GARIS KEBIJAKAN:**
- Pemprov Suntik Modal Rp163,5 Miliar

21 **KESEHATAN:**
- RSDP Kabupaten Serang Perkuat Mutu Pelayanan

22 **ARUS UTAMA;**
- Proyek di Kabupaten Serang Berpotensi Mandek

22-25 **WISATA/SISI KOTA**
- Gugatan Perpanjangan Jabatan Sekda Tangsel
- Eksplorasi Wisata Banten

EDITORIAL

Banten dan Perjalanan yang Belum Tuntas

Perjalanan Banten tidak pernah berdiri sendiri. Di dalamnya ada sejarah, perubahan, pembangunan, serta berbagai persoalan yang terus menyertai perjalanan sebuah daerah. Sejak resmi menjadi provinsi pada 4 Oktober 2000, Banten membawa harapan besar tentang pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, pembangunan yang merata, dan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh warganya.

Namun, perjalanan daerah tidak cukup dibaca dari usia pemerintahan, besarnya anggaran, atau pembangunan yang terlihat. Di balik setiap capaian, selalu ada proses yang perlu diperiksa. Di balik setiap kebijakan, terdapat tanggung jawab yang harus dijelaskan. Dan di balik setiap persoalan, ada kepentingan masyarakat yang tidak boleh diabaikan.

Banten memiliki potensi besar, mulai dari kawasan industri, perdagangan, pertanian, perikanan, pariwisata, hingga sumber daya alam. Potensi tersebut menjadi modal penting bagi pembangunan daerah. Namun, bagaimana seluruh potensi itu dikelola, siapa yang memperoleh manfaat, dan sejauh mana pembangunan menjawab kebutuhan masyarakat merupakan pertanyaan yang perlu terus diajukan.

Melalui pemberitaan dan penelusuran yang kami lakukan, ***Total Banten*** berupaya melihat perjalanan Banten dari berbagai sisi. Kami menempatkan data sebagai pijakan, meminta penjelasan kepada pihak terkait, serta menguji informasi sebelum menyajikannya kepada publik. Sebab, memahami Banten tidak cukup hanya dengan melihat apa yang disampaikan, tetapi juga perlu menelusuri apa yang terjadi dan bagaimana kebijakan dijalankan.

Kami menyadari, pembangunan daerah merupakan proses panjang yang melibatkan banyak pihak. Ada capaian yang patut dicatat, ada persoalan yang membutuhkan penyelesaian, dan ada kebijakan yang perlu terus dievaluasi. Semua itu harus ditempatkan secara proporsional agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh tentang daerahnya sendiri.

Bagi ***Total Banten***, pers bukan sekadar penyampai informasi. Pers memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar kepentingan publik tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan pembangunan. Kritik harus berpijak pada fakta, apresiasi harus memiliki dasar, dan setiap informasi harus disajikan dengan mempertimbangkan akurasi serta kepentingan masyarakat.

Kami tidak menempatkan diri sebagai hakim atas setiap kebijakan. Tugas kami adalah menelusuri, memeriksa, meminta penjelasan, dan menyampaikan fakta agar masyarakat dapat memahami persoalan secara lebih jernih. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, sementara publik memiliki hak untuk mengetahui bagaimana kewenangan itu dijalankan.

Melalui edisi ini, kami kembali menghadirkan berbagai informasi tentang Banten, mulai dari kebijakan pemerintahan, pembangunan, pengelolaan anggaran, hingga persoalan sosial dan lingkungan. Kami berharap rangkaian informasi tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memahami perjalanan Banten secara lebih menyeluruh, tanpa mengabaikan fakta dan suara masyarakat.

Pada akhirnya, masa depan Banten tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimiliki daerah ini, tetapi juga oleh bagaimana potensi dikelola, kebijakan dijalankan, dan tanggung jawab dipenuhi. Sejarah memberi kita pijakan, pembangunan membuka peluang, sedangkan keterbukaan dan keberanian mengevaluasi diri menjadi bagian penting untuk melangkah ke depan.

Banten adalah rumah bersama. Perjalanannya bukan hanya milik pemerintah atau mereka yang memegang kekuasaan, melainkan juga milik masyarakat yang hidup, bekerja, dan menggantungkan harapan di dalamnya. Karena itu, perjalanan Banten harus terus dicatat, diperiksa, dan dipahami agar setiap perubahan memiliki arti bagi kehidupan masyarakat.

Selain itu, dalam edisi ini kami menghadirkan berbagai informasi menarik dari Banten sebagai bagian dari ikhtiar kami merekam dinamika daerah, menyampaikan fakta, dan menjaga ruang publik tetap terbuka bagi kepentingan masyarakat.

Engkos Kosasih
Founder Total Banten

Dindikbud Kab. Serang

Kab. Serang Bahagia

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Selamat Memperingati

HARI SANTRI 2026

SANTRI MENGUATKAN NEGERI
MENUJU INDONESIA EMAS



Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd., M.M
Bupati Serang

M Najib Hamas, S.E., M.M
Wakil Bupati Serang



H. Aber Nurhadi, M.Pd
Kepala Dinas



Mohammad Hanafiah
Sekretaris Dinas



APBD Banten Menyusut

Nilai APBD Provinsi Banten (triliun rupiah)

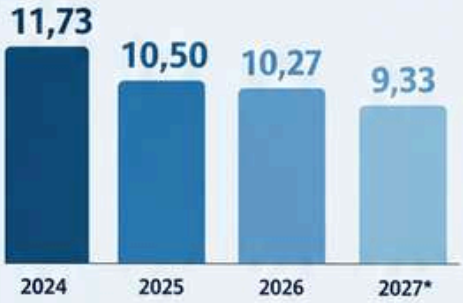

Turun **Rp2,40 triliun** atau **20,5%** dari 2024 ke 2027

*Proyeksi

Kemiskinan Masih Jadi Tantangan

746,73 ribu penduduk miskin (Maret 2026)

5,38%

Di perdesaan **6,23%** (lebih tinggi dari perkotaan)

Di perkotaan **5,21%**

Garis kemiskinan **Rp753.492** per kapita per bulan

Rata-rata rumah tangga miskin **Rp3,9 juta** per bulan (5,17 anggota rumah tangga)

Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banten

6,48%

(Mei 2026)

Penduduk bekerja **5,88 juta orang**

Bekerja di sektor formal **48,99%** (2,88 juta orang)

Ekonomi dan Investasi

Pertumbuhan ekonomi (triwulan II 2026) **5,49%** (nasional 5,29%)

Realisasi investasi (semester I 2026) **Rp66,3 triliun**

Inflasi (Agustus 2026) **2,95%**

Nilai Tukar Petani **113,02**

Suara Warga

"Kita tidak tahu ada HUT Banten, tapi itu gak penting juga kalau masyarakat masih hidup dalam kesusahan."

Samsuri
Nelayan, Panimbang
Pandeglang

"Gak ada kerasa apa-apa masalah Banten 26 tahun itu. Bahkan masalah ekonomi kesulitan."

Rawian
Petani, Tunjung Teja
Kabupaten Serang

"Pendidikan ini lumayan. Tapi ekonomi mah agak-agak susah sekarang. Susah cari kerja. Susah cari keria, enggak dapat."

Saniin
Warga, Mancak
Kabupaten Serang

"Menurut saya Banten makin acak-acakan pemerintahannya."

Hidayat
Pedagang, Kota Serang

Banten Punya Potensi Besar, Yang Dibutuhkan Adalah Pengelolaan yang Tepat

Di balik angka dan capaian, ada warga yang menantikan perubahan nyata. Pembangunan akan bermakna ketika manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat, dari kota hingga desa, dari pesisir hingga pegunungan.

Banten Maju Bukan Sekadar Harapan

Total Banten
bicara data, bicara fakta

HUT ke-26 Banten Antara Capaian Pembangunan dan Realitas Warga



Gubernur Banten Andra Soni saat memperingati HUT Banten ke-26. (Ist)

TOTAL BANTEN - Peringatan 26 tahun Provinsi Banten berlangsung di tengah dua gambaran yang berbeda. Di pusat pemerintahan, pembangunan dirayakan melalui capaian ekonomi, investasi, dan berbagai program pemerintah. Sementara itu, di sejumlah wilayah, warga masih berbicara tentang persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari: sulitnya mencari pekerjaan, pendapatan yang terbatas, kebutuhan pokok yang mahal, hingga kesulitan petani memperoleh air untuk sawah.

Pada Minggu, 4 Oktober 2026, perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Provinsi Banten digelar di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa pembangunan harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan semata-mata dari jumlah program yang dilaksanakan.

"Pembangunan bukan semata-mata tentang seberapa banyak program yang kita laksanakan, tapi tentang seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan dan seberapa nyata perubahan yang dapat dihadirkan bagi masyarakat," kata Andra Soni. Pernyataan itu menjadi salah satu pesan penting dalam peringatan hari jadi Banten. Namun, ukuran manfaat pembangunan juga dapat dilihat dari pengalaman warga yang menjalani kehidupan sehari-hari di berbagai wilayah provinsi ini.

Di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Samsuri, seorang nelayan, bahkan tidak mengetahui bahwa Banten sedang memperingati hari jadinya yang ke-26. Baginya, perayaan bukan persoalan utama ketika kebutuhan hidup masih menjadi beban.

"Kita tidak tahu ada HUT Banten, tapi itu gak penting juga kalau masyarakat masih hidup dalam kesusahan," katanya kepada ***Total Banten***. Pengalaman serupa disampaikan Rawian, petani di Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang. Ia mengaku tidak merasakan perubahan kesejahteraan yang berarti selama Banten menjadi provinsi. Persoalan ekonomi masih menjadi bagian dari kehidupan yang harus dihadapinya.

"Gak ada kerasa apa-apa masalah Banten 26 tahun itu. Bahkan masalah ekonomi kesulitan," ujarnya. Bagi Rawian, persoalan petani bukan hanya tentang hasil panen. Ketersediaan air dan peralatan untuk mengolah sawah juga menentukan kelancaran pekerjaan mereka.

"Belum. Belum pernah sejahtera. Macam di sawah, petani yang nyangkul kekurangan air. Gak ada alat buat penarik di sawahnya," katanya. Meski demikian, Rawian mengakui adanya perubahan yang dirasakan di lingkungannya. Kondisi jalan di kampungnya kini lebih baik dibandingkan sebelumnya.

"Alhamdulillah di kampung saya ini selama 26 tahun masalah jalan udah, alhamdulillah, udah baik. Cuma masalah ekonomi banyak lemah masyarakat," ungkapnya. Pengalaman Rawian memperlihatkan bahwa perubahan pembangunan dapat dirasakan pada satu aspek, tetapi persoalan lain masih membutuhkan perhatian. Infrastruktur jalan yang membaik belum dengan sendirinya menyelesaikan persoalan ekonomi rumah tangga petani. Di Kampung Kadu Embe, Desa Sangiang, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Saniin juga menyampaikan persoalan yang berbeda. "Pendidikan ini lumayan. Tapi ekonomi mah agak-agak susah sekarang. Susah cari kerja. Susah cari kerja, enggak dapat," ujarnya.

Kesulitan ekonomi, menurut Saniin, juga berkaitan dengan kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Penghasilan yang diperoleh harus dihadapkan pada kebutuhan rumah tangga yang terus menuntut pemenuhan.

"Yang penting lah masalah ekonomi agak-agak murah. Belanja-belanja juga agak murah. Sekarang naik semua, memang beban. Susah-susah," katanya.

Sementara itu, Hidayat, seorang pedagang di Kota Serang, menyampaikan penilaiannya sendiri terhadap kondisi pemerintahan daerah. "Tidak tahu (HUT Banten). Menurut saya Banten makin acak-acakan pemerintahannya," ujarnya.

Pernyataan warga tersebut merupakan pengalaman dan penilaian individual. Namun, persoalan yang mereka sampaikan memiliki titik temu, yakni harapan agar pembangunan dan kebijakan pemerintah menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. *(Selanjutnya)*



Ilustrasi warga miskin di Banten. (Ist)

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan gambaran lain mengenai kondisi sosial ekonomi Banten. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 746,73 ribu orang atau 5,38 persen dari total penduduk. Persentase kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 6,23 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang sebesar 5,21 persen.

Pada periode yang sama, garis kemiskinan Banten tercatat Rp753.492 per kapita per bulan. Dengan rata-rata anggota rumah tangga miskin sebanyak 5,17 orang, nilai tersebut setara dengan sekitar Rp3,9 juta per rumah tangga per bulan berdasarkan penghitungan garis kemiskinan.

Di bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka Banten pada Mei 2026 tercatat sebesar 6,48 persen. Jumlah penduduk yang bekerja mencapai 5,88 juta orang, tetapi sekitar 2,88 juta orang atau 48,99 persen di antaranya bekerja dalam kegiatan formal. Angka-angka tersebut menunjukkan kondisi kemiskinan dan ketenagakerjaan yang masih menjadi bagian dari persoalan pembangunan Banten. Data itu tidak dengan sendirinya menjelaskan penyebab kesulitan yang dialami setiap warga, tetapi memberikan konteks untuk membaca persoalan yang mereka sampaikan. Di sisi lain, pemerintah provinsi memaparkan sejumlah indikator makroekonomi yang menunjukkan perkembangan positif.

Dalam sambutan HUT ke-26, Andra Soni menyebut pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan II 2026 mencapai 5,49 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen.

Inflasi pada Agustus 2026 tercatat sebesar 2,95 persen. Pemerintah provinsi juga melaporkan realisasi investasi sebesar Rp66,3 triliun pada semester pertama 2026 serta kenaikan Nilai Tukar Petani menjadi 113,02.

Menurut Andra, investasi perlu memberikan manfaat lebih luas, terutama melalui penciptaan kesempatan kerja. “Bukan hanya investasi yang besar, tetapi investasi tersebut harus berkualitas dan berdampak langsung terhadap perluasan kesempatan kerja,” ujarnya.

Pemerintah provinsi juga mendorong program pendidikan melalui pendekatan link and match serta sekolah gratis bagi siswa SMA, SMK, dan Sekolah Khusus swasta. Sementara itu, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, menilai posisi Banten strategis bagi perekonomian nasional karena menjadi penghubung Pulau Jawa dan Sumatera serta memiliki infrastruktur pendukung industri dan logistik.

Data Indeks Pembangunan Manusia Banten pada 2025 juga tercatat mencapai 77,25, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 75,90. Adapun tingkat kemiskinan Banten pada Maret 2026, sebesar 5,38 persen, berada di bawah angka nasional yang tercatat 8,07 persen.

Capaian tersebut merupakan bagian penting dalam membaca perkembangan Banten. Namun, indikator makroekonomi dan pengalaman masyarakat mengukur aspek yang berbeda. ***(Eks/Red)***

Ratu Rachmatuzakiyah Pamer Capaian Program saat HUT Kabupaten Serang ke-500 Tahun



TOTAL BANTEN - Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengklaim sejumlah indikator pembangunan Kabupaten Serang mengalami peningkatan signifikan sepanjang 2025. Klaim tersebut disampaikan dalam momentum Hari Jadi ke-500 Kabupaten Serang yang diperingati pada 8 Oktober 2026.

Lima sektor yang menjadi sorotan pemerintah daerah meliputi penurunan pengangguran, kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi serta berbagai program pelayanan dasar masyarakat.Berdasarkan data yang disampaikan Bupati Serang, tingkat pengangguran terbuka turun 0,45 poin menjadi 8,73 persen. Angka kemiskinan juga turun 0,03 poin menjadi 4,48 persen dan disebut sebagai angka terendah ketiga di Provinsi Banten. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat 0,82 poin menjadi 74,10.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang juga diklaim naik 0,35 poin menjadi 5,52 persen. Meski mengklaim sejumlah indikator mengalami perbaikan, Ratu menegaskan capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. "Di balik setiap angka terdapat keluarga dan warga yang menunggu kebijakan yang lebih tepat sasaran," kata Ratu dalam pidatonya.

Menurutnya, pekerjaan pemerintah masih panjang. Sejumlah persoalan seperti pengangguran, kualitas pekerjaan, kesenjangan antarwilayah, kemiskinan dan stunting masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah. (dok)

Dalam bidang kesehatan, Pemkab Serang mengklaim telah memfasilitasi jaminan kesehatan bagi 717.147 warga kurang mampu. Selain itu, sebanyak 559.770 jiwa mendapatkan pelayanan cek kesehatan gratis. Pemkab Serang juga melakukan rehabilitasi empat puskesmas dan pembangunan satu puskesmas. Program pendampingan ibu hamil, penguatan gizi, penanganan stunting hingga upaya menekan angka kematian ibu dan bayi turut dilakukan.

Di sektor pendidikan, pemerintah memberikan beasiswa kepada 1.866 siswa SD, 1.228 siswa SMP dan 253 guru.

Pemkab Serang juga menaikkan insentif bagi 20.445 guru madrasah dan guru ngaji sebesar 50 persen. Revitalisasi sekolah serta penguatan pendidikan keagamaan melalui pelatihan baca tulis Al-Qur'an dan penyusunan kurikulum muatan lokal juga menjadi bagian program pemerintah.

Sementara dalam penanganan kemiskinan, bantuan usaha ekonomi produktif sebesar Rp2,5 juta per penerima telah diberikan kepada 1.396 warga. Selain itu terdapat 30 paket Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan nilai Rp15 juta per kelompok.

Pemkab Serang juga menyebut telah menangani 457 rumah tidak layak huni pada 2025 dan menargetkan penanganan 2.400 rumah pada 2026. Ratu juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat, termasuk bantuan pembangunan rumah yang disebut mencapai 500 unit melalui Kementerian Perumahan Rakyat.

Di sektor ketenagakerjaan, sebanyak 1.529 warga disebut telah mendapatkan pelatihan kerja berbasis kompetensi, pemagangan dan sertifikasi keterampilan. Sedangkan pelayanan pencari kerja dan penempatan tenaga kerja mencapai 10.219 orang melalui bursa kerja serta pameran lowongan kerja. Pemkab Serang juga memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

Untuk sektor ekonomi, pemerintah memberikan pelatihan kepada 813 pelaku usaha mikro serta 652 pengurus dan pengawas Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di 326 desa.

Pengembangan kawasan pesisir juga menjadi perhatian. Pemkab Serang memberikan dukungan kepada 55 kelompok nelayan, melatih 430 warga dalam budidaya ikan serta memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 200 nelayan rentan.

Program Kampung Nelayan Merah Putih di Domas juga terus dikembangkan, disertai penguatan sarana desa wisata dan kelompok sadar wisata di 31 desa wisata. Sementara di sektor lingkungan hidup, Pemkab Serang mengklaim telah membentuk 24 bank sampah baru dan satu bank sampah induk. Pemerintah juga menambah sembilan armada amrol serta 64 kontainer.

Kerja sama pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik turut dilakukan. Selain itu, penataan kawasan kumuh seluas 10,06 hektare, normalisasi sungai, penguatan tebing sungai, penyediaan air bersih dan penanganan air limbah menjadi bagian dari program lingkungan. Di sektor pertanian, produksi padi Kabupaten Serang pada 2025 disebut mencapai 635.000,076 ton. Angka tersebut melampaui target produksi sebesar 541.435 ton. *(Selanjutnya)*

Pemkab Serang juga melakukan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, memberikan bantuan alat dan mesin pertanian, benih dan bibit tanaman, pengembangan komoditas serta vaksinasi untuk menjaga kesehatan hewan ternak.

Sementara di bidang infrastruktur, pemerintah melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan kabupaten sepanjang 68 kilometer serta rehabilitasi 13 jembatan.

Program penerangan jalan juga dilakukan di 20 kecamatan dengan pemasangan 555 titik penerangan jalan umum baru dan pemeliharaan 1.025 unit lampu jalan.

Penguatan keselamatan transportasi dilakukan melalui pemasangan marka jalan sepanjang 17.150 meter, 116 rambu lalu lintas dan penunjuk arah serta rambu pendahuluan penunjuk jurusan. Sebanyak 75 petugas juga ditempatkan di 15 perlintasan kereta api. Selain itu, pengaturan lalu lintas dilakukan di 21 titik rawan kemacetan.

Ratu Zakiyah menegaskan pembangunan Kabupaten Serang ke depan harus berorientasi pada pemerataan. "Tidak ada desa yang tertinggal, tidak ada wilayah yang terabaikan dan tidak ada kelompok masyarakat yang luput dari perhatian pembangunan," tegasnya.

Ia mengatakan Pemkab Serang akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten maupun pemerintah pusat untuk membuka peluang dukungan anggaran bagi berbagai program pembangunan daerah. Namun, Ratu mengingatkan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran maupun banyaknya program. Pemerintah harus memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak terhadap masyarakat. "Pembangunan harus ditopang pemerintah yang bersih, terbuka, cepat dan berorientasi pada hasil," ujarnya.

Ia juga menekankan reformasi birokrasi harus dapat dirasakan langsung masyarakat melalui pelayanan yang sederhana, data yang akurat, pengaduan yang ditindaklanjuti serta penggunaan anggaran yang menjawab kebutuhan masyarakat.

Momentum lima abad Kabupaten Serang, kata Ratu, tidak boleh berhenti sebagai seremoni. Usia 500 tahun harus menjadi pijakan untuk membangun pemerintahan yang lebih bersih, pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan yang lebih merata.

"Setiap rupiah anggaran harus dapat kita pertanggungjawabkan," tegasnya.

Menurut Ratu, Kabupaten Serang hari ini berdiri dari kerja keras para pendahulu. Karena itu, generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk meninggalkan warisan pembangunan yang lebih baik bagi generasi berikutnya. "Generasi yang akan datang akan berdiri karena apa yang kita kerjakan pada hari ini," pungkasnya. perjalanan lima abad Kabupaten Serang harus menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas sosial, persatuan, serta kepedulian antarmasyarakat.

“Harapannya tentu, semoga ke depan kita terus bisa memperkuat solidaritas sosial, memperkuat persatuan, memperkokoh kepedulian, sehingga kemudian Kabupaten Serang bisa berkembang maju tanpa ada kendala apa pun,” kata Ratu Zakiyah.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Serang. Karena itu, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai pihak menjadi salah satu kunci untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

“Kami tentu pemerintah Kabupaten Serang butuh kolaborasi, sinergi dari berbagai pihak. Bersatu saja belum tentu kita kuat, apalagi kita bercerai-berai. Oleh karena itu, mari kita bersatu padu untuk memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Serang yang kita cintai,” pungkasnya. ***(Pung/Red)***





Pegawai Terjebak di Toilet

Gedung Pengadilan Agama Banten Terbakar

TOTAL BANTEN - Kebakaran melanda lantai dua Gedung Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banten di Jalan Raya Serang-Pandeglang, Rabu (7/10/2026). Seorang pegawai sempat terjebak di kamar mandi saat api membakar sejumlah ruangan, sebelum akhirnya berhasil dievakuasi petugas pemadam kebakaran dalam kondisi selamat.

Tidak ada korban luka dalam peristiwa tersebut. Api yang semula terlihat dari area aula atau ruang rapat di lantai dua merembet ke sejumlah ruangan lain, termasuk ruang Panitera Muda Hukum, ruang sidang, ruang administrasi, ruang arsip, dan ruang banding. Komandan Regu Pemadam Kebakaran Kota Serang, Halili, mengatakan pegawai tersebut ditemukan saat petugas melakukan pemadaman di lantai dua gedung.

"Untuk yang terjebak ada, namun alhamdulillah bisa kita evakuasi. Di kamar mandi satu orang," kata Halili di lokasi kejadian. Menurut Halili, api telah berhasil dipadamkan setelah petugas gabungan dari Damkar Kota Serang, Damkar Kabupaten Serang, Damkar Provinsi Banten, BPBD, dan Kodim melakukan penanganan. "Kalau untuk saat ini alhamdulillah api sudah bisa dipadamkan berkat bantuan dari rekan-rekan dari Damkar provinsi, kabupaten maupun dari Kodim," ujarnya. Sebanyak delapan unit kendaraan pemadam dikerahkan untuk menangani kebakaran. Empat unit berasal dari Damkar Kota Serang, sementara unit lainnya berasal dari Damkar Kabupaten Serang, Damkar Provinsi Banten, BPBD Provinsi Banten, dan Kodim.

Halili menyebut kebakaran terjadi di sejumlah titik. Kerusakan paling parah berada di ruang rapat atau aula di lantai dua. Meski demikian, api tidak menghanguskan seluruh gedung, melainkan sejumlah ruangan tertentu.
"Kalau untuk yang terbakar ada beberapa titik. Titik yang pertama yaitu di ruang rapat, lalu kemudian ada di titik-titik yang lain di ruangan-ruangan tertentu," katanya.

Pegawai PTA Banten, Haity Mella, mengatakan para pegawai sedang mengikuti rapat ketika terdengar suara keras seperti benda runtuh. Tak lama berselang, mereka diminta segera keluar dari gedung. "Kita lagi rapat, ada suara keras, tiba-tiba disuruh keluar karena katanya kebakaran," kata Haity. Ia menduga api muncul dari bagian plafon lantai dua. Namun, Haity mengaku belum mengetahui penyebab pasti kebakaran.

Sementara itu, saksi mata bernama Rafi menduga kebakaran berkaitan dengan pekerjaan perbaikan plafon yang mengalami kebocoran. Menurut dia, pekerjaan tersebut menggunakan bahan yang mudah terbakar dan diduga memicu gangguan pada instalasi listrik.
"Kebakaran ini setahu saya disebabkan pekerjaan untuk menutup plafon kebocoran, jadi menggunakan bahan-bahan yang mudah terbakar hingga terjadi korsleting listrik, hingga terjadi kebakaran," ujar Rafi.

Dugaan tersebut belum menjadi kesimpulan resmi. Hingga berita ini ditayangkan, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Petugas juga melakukan pendataan terhadap kerusakan dan nilai kerugian akibat peristiwa tersebut. Kebakaran yang terjadi saat aktivitas perkantoran berlangsung itu membuat pegawai harus meninggalkan gedung untuk menyelamatkan diri.

Evakuasi seorang pegawai yang terjebak di kamar mandi menjadi salah satu bagian penting dalam penanganan kebakaran tersebut. Total Banten masih melakukan penelusuran lebih jauh terkait penyebab kebakaran tersebut. Pihak Pengadilan belum memberikan keterangan pers. ***(Dir/Red)***



ASN Banten 'Ngopi' saat Apel

Tunjangan Gede, Tetap Membandel

TOTAL BANTEN - Hak keuangan besar yang diterima aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tampaknya belum berbanding lurus dengan tingkat kedisiplinan. Sebab masih banyak ditemukan pegawai yang justru duduk, ngopi hingga bermain gawai saat apel Hari Kesaktian Pancasila berlangsung, pada 1 Oktober 2026. Hal itu ditemukan oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) Disiplin Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten. Tim Satgas bahkan terlihat kerepotan untuk menertibkan para pegawai agar masuk barisan apel.

Kepala BKD Provinsi Banten Ai Dewi Suzana meminta pegawai tidak cukup hanya datang dan tercatat dalam absensi. Kewajiban sebagai ASN juga mencakup kepatuhan terhadap disiplin kedinasan. Ia bahkan secara khusus menyoroti pegawai yang memilih duduk, minum kopi atau menggunakan gawai ketika apel berlangsung. "Tidak ingin lagi ada pegawai yang justru asyik duduk, ngopi, dan main gawai saat apel. Kecuali bagi yang sakit dan ibu hamil," kata AI dikonfirmasi, Jumat (2/10/2026).

Diketahui, berdasarkan lampiran Peraturan Gubernur Banten nomor 23 tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan tahun 2026, tunjangan ASN di lingkungan cukup besar. Di antaranya Sekretaris Daerah sebesar Rp76,5 juta, Asisten Daerah dan sejumlah kepala perangkat daerah Rp55 juta, kepala OPD lainnya Rp47 juta, pejabat eselon III hingga Rp30 juta, kepala sekolah Rp14 juta. Serta besaran berbeda untuk jenjang jabatan dan golongan lainnya, mulai dari Rp2,5 juta hingga Rp11 juta. Tunjangan tersebut melekat hingga pada tingkat kepatuhan ASN. Menurut Ai, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan dan memastikan pegawai yang dipimpinnya mengikuti apel dengan tertib. Sebab lanjut Ai, pembinaan tidak hanya menjadi tugas BKD. Kepala OPD harus menjadi pihak pertama yang memastikan pegawainya disiplin. "Cek dulu seluruh pegawainya. Setelah tertib, rapi, kepala OPD baru mengikuti apel di tempat yang sudah disediakan," tegas Ai. Ai mengatakan, BKD akan menindaklanjuti instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan untuk memberikan surat teguran kepada OPD yang pegawainya ditemukan tidak tertib. "Secepatnya akan kami sampaikan," kata Ai. Sementara itu, Sekda Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan menyatakan mendukung langkah BKD bersama tim Satgas Disiplin. "Saya mendukung apa yang dilakukan BKD beserta tim Satgas Disiplin. Ini dilakukan dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai sesuai dengan arahan Pak Gubernur Banten," kata Deden.

Deden meminta kepala OPD melakukan pembinaan terhadap seluruh pegawai di lingkungan kerjanya.
Menurutnya, ASN tidak boleh memaknai kedisiplinan hanya sebatas datang dan melakukan absensi.
"Bukan hanya sekadar absen. Tanggung jawab ASN lebih dari itu," tegasnya.

Deden juga memerintahkan BKD memberikan surat teguran sebagai tindak lanjut penertiban.
"Sebagai tindak lanjutnya, nanti akan diberikan surat teguran," pungkasnya.
(Eks/Red)



Dinsos Akui Banyak Warga Miskin di Pandeglang Belum Tersentuh Bantuan

Ilustrasi; Warga Miskin di Pandeglang. (Dok)

TOTAL BANTEN - Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Pandeglang, Banten, belum menjangkau seluruh warga yang membutuhkan hingga awal Oktober 2026. Realisasi belanja bansos baru mencapai 66 persen, sementara Dinas Sosial (Dinsos) mengakui masih banyak masyarakat yang belum terjangkau bantuan pemerintah.

Capaian tersebut menjadi sorotan di tengah kebutuhan masyarakat terhadap bantuan sosial. Di satu sisi, data calon penerima disebut sudah tersedia. Namun, di sisi lain, realisasi anggaran masih belum maksimal dan persoalan pendataan masih menjadi kendala dalam menjangkau warga yang membutuhkan.

Staf Pelaksana Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinsos Pandeglang, Beni Aprianto, mengatakan proses penyaluran bantuan masih berjalan. Menurutnya, data sasaran penerima telah tersedia, sedangkan realisasi bantuan masih menunggu dukungan anggaran. “Kalau target kita, datanya sudah ada. Tinggal anggarannya saja,” kata Beni, Rabu (14/10/2026).

Berdasarkan data yang disampaikan Beni, anggaran program terkait standar pelayanan minimal (SPM) mencapai Rp291,76 juta. Dari jumlah tersebut, realisasi belanja baru sebesar Rp192,06 juta atau sekitar 66 persen. Sementara itu, anggaran Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial tercatat sebesar Rp106,7 juta, dengan realisasi Rp70,55 juta atau sekitar 66 persen. Angka tersebut menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terealisasi. Pada saat yang sama, Dinsos mengakui masih banyak masyarakat yang perlu diusulkan sebagai penerima bantuan, termasuk warga yang membutuhkan perbaikan data agar dapat masuk dalam sasaran program.

Beni bahkan mengakui keterbatasan jangkauan pelayanan sosial masih menjadi persoalan yang dihadapi instansinya.

“Banyak, itu sangat banyak sekali. Kami juga di Dinsos tidak sepenuhnya bisa



mencakup semua urusan sosial seperti itu,” ujarnya. Untuk memperluas jangkauan bantuan, Dinsos Pandeglang melibatkan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta pemerintah desa. Mereka dilibatkan dalam pengusulan calon penerima bantuan dan pembaruan data masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah.

Namun, perubahan data sasaran dan kendala sistem disebut turut memengaruhi penyerapan anggaran. Beni menilai anggaran bansos yang tidak terserap hingga akhir tahun relatif jarang terjadi, kecuali terdapat perubahan data penerima atau persoalan teknis dalam sistem. “Kalau sampai tidak terserap sih sangat jarang, kecuali data target mengalami perubahan atau ada kesalahan sistem,” jelasnya. Di luar program bansos, Beni juga menyebut anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan bencana pada 2026 mencapai sekitar Rp395 juta. Anggaran tersebut dikelola melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dengan pencairan disesuaikan berdasarkan tingkat kedaruratan dan kebutuhan mendesak di lapangan. “Kalau BTT itu anggarannya bukan langsung di kita, tetapi dari BPKD. Itu tergantung kedaruratan atau kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan,” pungkasnya. ***(Tur/Red)***



BPS Catat 37,88 Persen

Pandeglang Jadi Jawara Perokok di Banten

Ilustrasi; Perokok di Pandeglang. (Dok)

TOTAL BANTEN - Persentase penduduk yang merokok setiap hari di Kabupaten Pandeglang mencapai 37,88 persen pada 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025, angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan tujuh kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten.

Kepala BPS Kabupaten Pandeglang, Achmad Widijanto, mengatakan, proporsi pengeluaran masyarakat untuk rokok juga meningkat dalam dua tahun terakhir. Pada 2024, proporsinya tercatat sekitar 17 persen, kemudian naik menjadi 18,64 persen pada 2025.

"Kalau di 2024, proporsi pengeluaran masyarakat untuk rokok sekitar 17 persen. Pada 2025 naik menjadi 18,64 persen," kata Achmad kepada wartawan Jumat (16/10/2026).

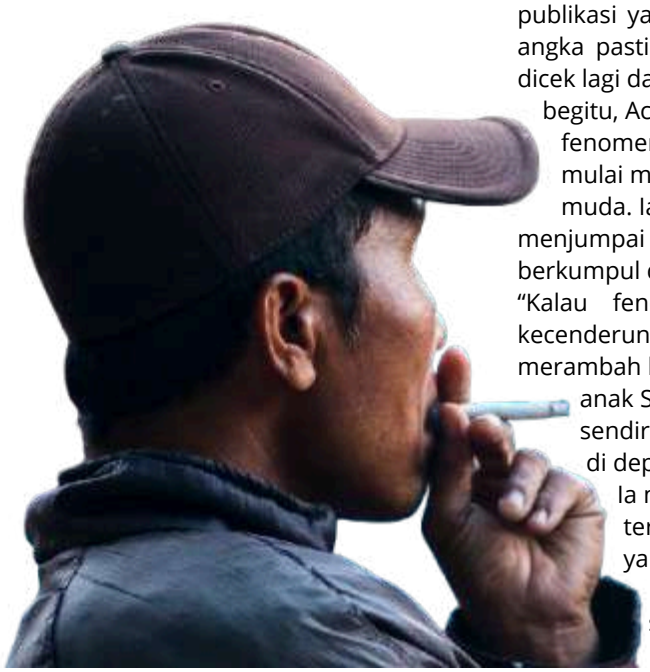

Achmad menjelaskan, angka tersebut merupakan proporsi pengeluaran rata-rata per kapita, bukan persentase penduduk yang merokok. “Karena itu, kenaikan proporsi belanja rokok tidak bisa langsung diartikan sebagai peningkatan jumlah perokok. Ini rata-rata per kapita, artinya pengeluarannya dibagi dengan jumlah penduduk. Kalau ada orang yang tidak merokok, tetap masuk dalam perhitungan rata-rata tersebut,” jelasnya. Menurut Achmad, untuk mengetahui tren perokok berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, diperlukan publikasi BPS yang secara khusus memuat data tersebut. Ia belum bisa memastikan kelompok usia yang paling banyak merokok di Pandeglang berdasarkan angka statistik.

“Kalau untuk data berdasarkan kelompok umur, kita harus melihat publikasi yang lebih khusus. Jadi, untuk angka pastinya berdasarkan usia, perlu dicek lagi datanya,” ujarnya. Meski begitu, Achmad mengaku melihat fenomena kebiasaan merokok yang mulai merambah kalangan usia muda. Ia mengaku pernah menjumpai sekelompok pelajar SMP berkumpul di sekitar gerai minimarket.

“Kalau fenomena yang saya amati, kecenderungannya sudah mulai merambah kelompok muda, bahkan anak SMP. Saya pernah melihat sendiri anak-anak SMP berkumpul di depan minimarket,” ungkapnya.

Ia menegaskan, pengamatan tersebut merupakan fenomena yang dijumpai secara langsung dan bukan hasil pengukuran statistik. BPS belum memiliki angka khusus yang dapat memastikan peningkatan jumlah perokok di kalangan pelajar SMP berdasarkan keterangan tersebut.

Achmad menambahkan, sebagian perokok berusia lebih tua mungkin berhenti karena kesadaran terhadap kesehatan, edukasi, atau kondisi medis. Sementara itu, kebiasaan merokok pada kelompok muda perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui jumlah dan perkembangannya.



“Yang sudah tua mungkin ada yang mulai sadar, ada yang terkena penyakit, atau terpaksa berhenti karena kondisi kesehatan. Sementara kelompok muda mungkin masih dalam tahap mencoba-coba. Tetapi, untuk mengetahui jumlahnya, kita belum mengecek secara khusus,” tuturnya. Berdasarkan data Susenas 2025, setelah Pandeglang, persentase penduduk yang merokok setiap hari tercatat di Kabupaten Lebak sebesar 34,06 persen, Kabupaten Serang 32,16 persen, dan Kabupaten Tangerang 30,58 persen.

Adapun Kota Serang tercatat 32,16 persen, Kota Cilegon 27,24 persen, Kota Tangerang 23,87 persen, dan Kota Tangerang Selatan 19,31 persen. Data tersebut menunjukkan persentase penduduk yang merokok setiap hari di Pandeglang lebih tinggi dibandingkan tujuh kabupaten/kota lainnya di Banten.

(Tur/Red)


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KOTA SERANG
HUMAS
SELAMAT MEMPERINGATI
HARI
SANTRI
2026
SANTRI MENGUATKAN NEGERI
MENUJU INDONESIA EMAS
Muhammad Farhan Aziz, S.Ak., M.Sc
Wakil Ketua II
H. Muji Rohman, SH
Ketua
Roni Alfanto, SE
Wakil Ketua I
Hasan Basri, S.Ag
Wakil Ketua III
Iman Setiawan, S.Sos., MM
Sekretaris DPRD Kota Serang
@dprdkotaserang
DPRDKotaSerang
@DPRDKotaSerang
www. setdprd.serangkota.go.id
setdprd@serangkota.go.id


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG
BerAKHLAK
Selamat Memperingati Hari
SANTRI NASIONAL
22 OKTOBER 2026
Santri Menguatkan Negeri
Menuju Indonesia Emas
HARI
SANTRI
2026
SANTRI MENGUATKAN NEGERI
MENUJU INDONESIA EMAS
H. TB. A. KHATIBUL UMAM, M.Pd
KETUA DPRD
FIKRI PEBRIANSYAH, S.Sos
WAKIL KETUA DPRD
M. DADI RAJADI, SE
WAKIL KETUA DPRD
MM. FUHAIRA AMIN, SE
WAKIL KETUA DPRD
H. MUSLIM TAUFIQ, S.Ag, M.Pd
Plt. SEKRETARIS DPRD



Golkar Panaskan Mesin Jauh Sebelum 2029, Apa Targetnya?

Jajaran Anggota DPD Partai Golkar Banten. (Dok)

TOTAL BANTEN - Partai Golkar Banten mulai mengencangkan barisan menghadapi pertarungan politik 2029. Konsolidasi internal, loyalitas kader, dan upaya mempertahankan suara menjadi pekerjaan rumah yang disiapkan sejak dini, termasuk mematangkan calon anggota legislatif mulai 2027.

Pesan politik itu mengemuka dalam peringatan HUT ke-62 Partai Golkar melalui ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Ciceri, Kota Serang, Banten, Selasa (20/10/2026).



Ketua DPD I Partai Golkar Banten, Andika Hazrumy, menegaskan bahwa kebersamaan dan kekompakan menjadi kunci bagi partainya untuk menjaga eksistensi sekaligus mempertahankan perolehan suara pada pemilu mendatang.

"Yang paling utama, kunci evaluasi kemarin dari Partai Golkar adalah bagaimana mempertahankan kebersamaan dan kekompakan," kata Andika. Menurut Andika, evaluasi dari perjalanan politik sebelumnya harus menjadi pijakan untuk memperkuat soliditas partai, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.

Ia mengingatkan, tantangan politik menuju 2029 tidak bisa dipandang sebelah mata. Golkar harus menyiapkan strategi secara terukur, terlebih agenda pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah direncanakan berlangsung secara terpisah. Karena itu, partai berlambang pohon beringin tersebut perlu memperkuat konsolidasi sekaligus membaca peta kekuatan politik di setiap daerah. Terkait strategi menghadapi pemilihan kepala daerah di delapan kabupaten/kota di Banten, Andika mengatakan Golkar akan mempertimbangkan hasil perolehan suara pada pemilihan legislatif sebagai salah satu bahan evaluasi. "Jadi kita belum bisa pastikan, yang pasti kita kerja politiknya bagaimana nanti di 2029 Partai Golkar provinsi, kabupaten, kota, mereka mampu memaksimalkan untuk menjaga suara yang sudah ada saat ini," ujarnya. Tak hanya berbicara soal strategi, Andika juga mulai menyiapkan fondasi untuk menghadapi Pemilihan Legislatif 2029. Persiapan calon anggota legislatif direncanakan mulai dimatangkan pada 2027, dengan mempertimbangkan regulasi dan proses kaderisasi. Ia menegaskan, Golkar ingin mengusung kader yang memiliki loyalitas terhadap partai, bukan sekadar figur yang berorientasi pada pencalonan. "2027 ini sudah disiapkan draftnya nanti dilihat dari sisi aturan regulasi ke-kaderannya. Jadi Pak Ketua Umum ini ingin kader-kader yang diusung oleh Partai Golkar di pileg, kader-kader yang sudah mempunyai loyalitas terhadap Partai Golkar," tegasnya. Di sisi lain, Andika menegaskan Golkar tetap berkomitmen mendukung dan mengawal pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "Partai Golkar wajib mengawal pembangunan Pak Prabowo dan Pak Gibran," pungkasnya.

Sementara itu, ziarah ke TMP Ciceri menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-62 Partai Golkar. Kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai momentum mempererat silaturahmi dan menjaga kebersamaan antarkader. Sejumlah pengurus hadir dalam kegiatan itu, di antaranya Ketua DPD I Golkar Banten Andika Hazrumy, Ketua DPD II Golkar Kabupaten Serang Fahmi Hakim, Ketua DPD II Golkar Kota Serang Teguh Ista'al, serta Ketua DPRD Kota Serang Muji Rohman bersama jajaran pengurus lainnya. Andika mengatakan, ziarah tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum mengenang jasa para pahlawan dan pendiri Golkar, termasuk almarhum Tubagus Suwandi yang dimakamkan di TMP Ciceri.

"Ketemu kangen, sudah lama enggak ketemu teman-teman, sekaligus tadi dalam rangkaian HUT Golkar. Dalam rangkaiannya kita ziarah ke taman makam pahlawan, khususnya mengenang jasa para pahlawan dan pendiri Golkar. Dan di sini ada makamnya Bapak Tubagus Suwandi," tutup Andika. ***(Dir/Red)***



Ribuan Pelajar Peragakan Jurus Silat Benteng di Kota Tangerang

Gebyar Silat Si Benteng Pelajar, Kota Tangerang. (Dok)

TOTAL BANTEN — Sebanyak 5.021 pelajar tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama memperagakan pencak silat secara kolosal dalam ajang Gebyar Silat Si Benteng Pelajar Kota Tangerang 2026 di Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang, Rabu (21/10/2026). Kegiatan tersebut mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Ribuan pelajar dari berbagai wilayah di Kota Tangerang itu menampilkan gerakan silat secara serentak dalam satu lokasi. Kegiatan yang digelar untuk pertama kalinya tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah melestarikan pencak silat sekaligus memperluas pembinaan olahraga bela diri di lingkungan sekolah. Penampilan para pesilat cilik hingga remaja itu disaksikan Wali Kota Tangerang Sachrudin bersama Wakil Wali Kota Tangerang Maryono dan jajaran pemerintah daerah. Sachrudin mengatakan, kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi ajang bagi pelajar untuk menunjukkan kemampuan, tetapi juga sarana pembentukan karakter dan pengenalan budaya bangsa kepada generasi muda. “Ini yang pertama di Kota Tangerang, Gebyar Silat yang menampilkan lebih dari 5.000 pelajar. Kami sangat bahagia melihat generasi penerus bangsa yang berkreasi dengan penuh semangat. Di antara mereka, ada harapan besar bagi bangsa kita, karena pemimpin masa depan adalah anak muda sekarang,” kata Sachrudin. Menurut dia, pencak silat memiliki nilai lebih dari sekadar olahraga. Melalui latihan dan pembinaan, pelajar dapat mempelajari kedisiplinan, sportivitas, tanggung jawab, pengendalian diri, serta sikap pantang menyerah. “Selain melestarikan seni budaya luhur bangsa, silat ini membina mentalitas, karakter pantang menyerah, serta kedisiplinan para siswa.



Maka memasyarakatkan dan membumikan silat di tengah pelajar ini harus terus kita upayakan,” ujarnya. Pemerintah Kota Tangerang, kata Sachrudin, berkomitmen mendukung pembinaan atlet pencak silat sejak usia dini. Pembinaan yang terstruktur diharapkan dapat melahirkan atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional, hingga internasional.

“Pencak silat bukan hanya olahraga, tapi warisan budaya yang harus kita banggakan. Melalui pembinaan yang terstruktur di tingkat pelajar, kita tidak hanya mencetak calon juara, tetapi juga membentengi anak-anak kita dengan kegiatan yang bernilai positif,” ungkapnya. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Kaonang mengatakan, pencatatan rekor MURI dengan melibatkan 5.021 pelajar merupakan hasil kolaborasi lintas sektor, termasuk Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI), Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), dan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Menurut Kaonang, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk apresiasi terhadap para pesilat pelajar yang telah menorehkan prestasi di tingkat kota, provinsi, nasional, hingga internasional.

Ia berharap kegiatan serupa dapat memotivasi pelajar lain untuk menekuni pencak silat dan mengembangkan kemampuan mereka. Ketua BAPOPSI Kota Tangerang Helmiati mengatakan, para peserta telah menjalani latihan selama hampir dua bulan di setiap kecamatan dengan pendampingan dan fasilitasi IPSI setempat.

Persiapan tersebut menjadi bagian dari pembinaan sekaligus upaya memperkenalkan pencak silat sebagai kegiatan ekstrakurikuler kepada lebih banyak pelajar. Helmiati berharap kegiatan itu dapat mendorong lahirnya bibit atlet yang mampu berprestasi di tingkat kota hingga internasional.

Gebyar Silat Si Benteng Pelajar Kota Tangerang 2026 diharapkan memperkuat pembinaan olahraga di sekolah sekaligus menjaga keberlanjutan pencak silat sebagai warisan budaya bangsa. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah juga berupaya menanamkan nilai kedisiplinan dan kebersamaan kepada generasi muda. ***(Dra/Red)***

Aksi Nyata Ketua DPRD Kota Serang

Melalui Tanam Pohon, Ajak Pemuda Jaga Lingkungan

> “Jangan hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan melalui aksi nyata, salah satunya dengan menanam dan merawat pohon agar lingkungan kita semakin asri dan rindang”
>
> **Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman**



Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman. (Dok)

Pesan Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, itu disampaikan saat mengajak generasi muda mengambil peran aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui gerakan penanaman dan perawatan pohon. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan penghijauan bersama organisasi pencinta alam dan lingkungan hidup Lebah Banten serta para penggiat alam untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98.

Kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi bagi berbagai elemen pemuda untuk terlibat dalam pelestarian lingkungan. Melalui aksi penanaman pohon, para peserta diajak membangun kepedulian terhadap alam sekaligus menjadikan penghijauan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

Muji mengatakan, kepedulian terhadap lingkungan perlu diwujudkan melalui tindakan nyata. Menurut dia, menanam pohon merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk mendukung terciptanya lingkungan yang asri, rindang, dan nyaman. “Kita perlu bergerak bersama dalam menjaga lingkungan,” kata Muji, (23/10/2026).

Ia menekankan bahwa gerakan penghijauan tidak semestinya hanya menjadi kegiatan seremonial yang berlangsung pada peringatan hari besar tertentu. Penanaman pohon perlu diikuti dengan pemeliharaan agar tanaman dapat tumbuh dan memberikan manfaat bagi lingkungan dalam jangka panjang. Muji berharap keterlibatan pemuda dalam kegiatan tersebut dapat mendorong tumbuhnya kebiasaan menjaga lingkungan di tengah masyarakat.

Kepedulian itu dapat dimulai melalui kegiatan sederhana, seperti menanam pohon, merawat tanaman, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pelestarian lingkungan juga menjadi salah satu bentuk kontribusi terhadap kehidupan sosial.

“Melalui kegiatan bersama, pemuda tidak hanya berpartisipasi dalam menjaga alam, tetapi juga membangun kerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki perhatian terhadap persoalan lingkungan,” ujarnya.

Menurut Muji, pelestarian alam merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dibebankan hanya kepada organisasi pencinta lingkungan. Dukungan masyarakat luas diperlukan agar kegiatan penghijauan dapat terus berjalan dan memberikan manfaat berkelanjutan. Karena itu, ia berharap semangat yang muncul dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda dapat diterjemahkan ke dalam kegiatan nyata.

Muji menekankan bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, komunitas, organisasi kepemudaan, dan masyarakat. Kolaborasi antarelemen dinilai penting untuk menumbuhkan kesadaran bahwa kelestarian lingkungan bukan hanya urusan kelompok pencinta alam, melainkan kepentingan seluruh warga.

“Partisipasi generasi muda sangat penting untuk memperluas kesadaran masyarakat mengenai perlunya menjaga dan merawat lingkungan,” ungkapnya. Ia berharap, momentum Hari Sumpah Pemuda ke-98 dapat mendorong lahirnya lebih banyak kegiatan positif yang melibatkan anak muda, terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Muji, semangat persatuan yang diwariskan para pemuda melalui Sumpah Pemuda harus terus diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. “Keberhasilan gerakan penghijauan tidak hanya diukur dari jumlah pohon yang ditanam, tetapi juga dari komitmen untuk merawatnya. Melalui momentum sumpah pemuda ini kita tumbuhkan kesadaran untuk terus menjaga lingkungan yang asri untuk generasi selanjutnya,” pungkas politisi Partai Golkar ini. **(Adv)*****

Pemilihan Ketua Kadin Banten Dimulai

Putra Dinasti Jayabaya Kembali Masuk Bursa Calon



Ketua Umum Kadin Banten, Amal Jayabaya. (Dok)

TOTAL BANTEN – Persaingan memperebutkan kursi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Banten periode 2026–2031 mulai bergerak. Petahana M Azzari Jayabaya atau Amal Jayabaya memastikan diri kembali maju dalam kontestasi kepemimpinan organisasi dunia usaha tersebut. Amal, putra mantan Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya, mengambil formulir pendaftaran calon Ketua Umum Kadin Banten di Gedung Kadin Provinsi Banten, Selasa (20/10/2026). Langkah itu menjadi sinyal awal keseriusannya mempertahankan posisi yang telah dijabatnya pada periode 2022–2026. Kedatangan Amal diterima Ketua Pengarah Musyawarah Provinsi (Muprov) VII Kadin Banten, H Nunung Nursiamuddin, bersama sejumlah panitia di ruang rapat utama Kadin Banten.

Pengambilan formulir tersebut menandai masuknya petahana ke dalam tahapan awal perebutan kepemimpinan Kadin Banten untuk lima tahun mendatang. Namun, pengambilan formulir belum dengan sendirinya memastikan Amal memenuhi seluruh persyaratan pencalonan. Amal menegaskan keputusannya untuk kembali mengikuti kontestasi. Ia menilai Kadin memiliki posisi strategis dalam mempertemukan kepentingan pelaku usaha dengan pemerintah, sekaligus mendorong iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan di Banten. “Saya pastikan maju lagi,” kata Amal.

Menurut dia, dunia usaha di Banten menghadapi tantangan yang semakin beragam. Persoalan tersebut mencakup peningkatan daya saing industri, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan keterlibatan pengusaha lokal dalam rantai pasok industri dan investasi.

Amal berharap Muprov VII Kadin Banten tidak sekadar menjadi forum pergantian kepemimpinan, tetapi juga momentum memperkuat soliditas organisasi dan merumuskan agenda yang memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha. Kontestasi ini sekaligus menempatkan rekam jejak kepemimpinan periode sebelumnya sebagai salah satu aspek yang relevan untuk diperhatikan. "Tantangannya, bagaimana Kadin Banten dapat memperluas peran pengusaha lokal, memperkuat UMKM, dan memastikan peluang investasi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah," katanya. Sementara itu, Ketua Pengarah Muprov VII Kadin Banten, H Nunung Nursiamuddin, mengatakan musyawarah provinsi merupakan agenda penting organisasi untuk menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan strategis Kadin Banten periode 2026–2031.



Amal berharap Muprov VII Kadin Banten tidak sekadar menjadi forum pergantian kepemimpinan, tetapi juga momentum memperkuat soliditas organisasi dan merumuskan agenda yang memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha. Kontestasi ini sekaligus menempatkan rekam jejak kepemimpinan periode sebelumnya sebagai salah satu aspek yang relevan untuk diperhatikan. "Tantangannya, bagaimana Kadin Banten dapat memperluas peran pengusaha lokal, memperkuat UMKM, dan memastikan peluang investasi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.

Sementara itu, Ketua Pengarah Muprov VII Kadin Banten, H Nunung Nursiamuddin, mengatakan musyawarah provinsi merupakan agenda penting organisasi untuk menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan strategis Kadin Banten periode 2026–2031. **(Red)**



Ketua DPD NasDem Banten, Wahidin Halim.

HUKRIM

Dituntut Lima Tahun Penjara

Direktur PT PMT Minta Dibebaskan dalam Kasus Limbah Cikande

TOTAL BANTEN - Direktur PT PMT Lin Jingzhang meminta dibebaskan dari seluruh dakwaan dalam perkara pencemaran dan kerusakan lingkungan terkait limbah yang terkontaminasi zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

Permintaan itu disampaikan setelah jaksa menuntutnya dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp 1 miliar. Permohonan tersebut disampaikan tim penasihat hukum Lin dalam sidang di Pengadilan Negeri Serang, Kamis (22/10/2026).

Tim pembela menilai tuntutan jaksa tidak tepat dan meminta majelis hakim membebaskan kliennya dari dakwaan kesatu dan kedua. “Bahwa tuntutan penuntut umum tersebut tidaklah benar. Meminta majelis hakim membebaskan terdakwa Lin Jingzhang dari seluruh dakwaan kesatu dan kedua penuntut umum,” kata penasihat hukum Lin dalam persidangan. Selain meminta pembebasan, tim penasihat hukum meminta agar Lin dikeluarkan dari tahanan dan memperoleh rehabilitasi untuk memulihkan harkat dan martabatnya. Mereka juga meminta majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila memiliki pertimbangan lain.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Banten, Fitriah, menuntut Lin dengan pidana penjara selama lima tahun. Jaksa menyatakan Lin terbukti melanggar Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lin Jingzhang berupa pidana penjara selama lima tahun,” kata Fitriah. Jaksa juga menuntut Lin membayar denda Rp 1 miliar.

Denda tersebut harus dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Tenggat pembayaran dapat diperpanjang paling lama satu bulan. Apabila denda tidak dibayar, penyitaan dan pelelangan harta atau pendapatan terdakwa dapat dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Jika penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi atau tidak dapat dilakukan, denda diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. Masa pidana pengganti denda itu juga dapat dikurangi secara proporsional apabila terdakwa membayar sebagian denda selama menjalani hukuman. Dalam pertimbangan tuntutannya, jaksa menyebut potensi gangguan terhadap kesehatan masyarakat akibat pencemaran lingkungan sebagai hal yang memberatkan. Lin juga dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga lingkungan dari bahaya limbah dan radiasi. “Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya menjaga lingkungan hidup dari bahaya limbah dan radiasi,” ujar jaksa. Adapun sikap sopan dan keterusterangan Lin selama persidangan menjadi pertimbangan yang meringankan.

Perkara ini bermula pada 19 Mei 2025. Saat itu, Sayuti, ketua RT di lingkungan perusahaan, menghubungi Tety Juarsih, staf penerjemah PT PMT, untuk meminta limbah sisa pembakaran stainless steel berupa terak (slag) dan pasir yang menumpuk di area pabrik. Permintaan tersebut diteruskan Tety kepada Lin selaku direktur perusahaan. Lin menyetujui permintaan itu dengan syarat perusahaan tidak menanggung biaya pengangkutan.



Sehari kemudian, 20 Mei 2025, Sayuti membawa truk engkel ke pabrik PT PMT. Dengan bantuan forklift milik perusahaan, limbah padat tersebut dimuat dan diangkut sebanyak dua kali.

Limbah itu kemudian digunakan untuk menguruk tanah di lapak pengepulan barang bekas milik Dadang Hidayat.

Dalam uraian perkara, penyerahan limbah kepada pihak ketiga tersebut dinilai melanggar ketentuan pengelolaan limbah. Pihak penerima disebut tidak memiliki izin untuk mengangkut, mengumpulkan, mengolah, ataupun menimbun limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, sisa bata tahan api dari fasilitas termal dikategorikan sebagai limbah B3 dengan kode 84L7 dan kategori bahaya 2. Untuk mengukur dampak pencemaran, pemerintah mengambil sampel tanah di area kerja PT PMT dan lapak pengepulan milik Dadang Hidayat pada 27 Oktober 2025.

Hasil pengujian laboratorium PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (ICBB) menyimpulkan terdapat kerusakan tanah yang signifikan akibat pembuangan limbah tersebut. Hasil pengujian menunjukkan kadar liat berada di bawah ambang kritis 18 persen, sedangkan kadar pasir mencapai 89,20 persen, melampaui ambang kritis 80 persen. Kondisi tersebut dinilai memicu ketidakstabilan tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000. Selain itu, nilai potensial redoks tanah tercatat berada di bawah ambang kritis 200 milivolt. (***Dir/Red)***



Gearing Ratio Jamkrida Banten Melebihi Ambang Batas OJK

Pemprov Suntik Modal Rp163,5 Miliar

Gubernur Banten, Andra Soni saat menyampaikan draf Raperda di Paripurna DPRD Banten. (Dok)

TOTAL BANTEN - PT Penjaminan Kredit Daerah Banten (Perseroda) atau Jamkrida Banten tengah menghadapi tekanan serius dalam pengelolaan risiko penjaminan. Rasio leverage penjaminan atau gearing ratio BUMD milik Pemprov Banten ini melonjak hingga 73,10 kali, melampaui batas maksimum 40 kali yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Artinya, gearing ratio tersebut menunjukkan bahwa beban kewajiban penjaminan yang ditanggung Jamkrida Banten saat ini tidak seimbang dengan kapasitas modal penyangganya.

Di tengah kondisi yang melampaui ambang batas aman tersebut, Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan penyertaan modal daerah sebesar Rp163,5 miliar guna menyelamatkan kapasitas usaha perusahaan. Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal ke PT Jamkrida Banten dalam rapat paripurna bersama DPRD Provinsi Banten di Serang, Banten. "Hal ini menunjukkan perlunya penguatan permodalan agar kapasitas penjaminan dapat ditingkatkan dan keberlangsungan kegiatan usaha dapat terjaga," kata Andra Soni dalam sambutan di DPRD Banten, Selasa (20/10/2026).

Menurut Andra, untuk menutupi celah kekurangan modal tersebut, Pemprov Banten merancang skema suntikan modal total Rp163,5 miliar. Suntikan ini mencakup alokasi dana tunai sebesar Rp149,712 miliar dan penyertaan aset barang milik daerah (BMD) berupa tanah dan bangunan senilai Rp13,788 miliar. "Penyaluran penyertaan modal dilakukan secara bertahap, pada APBD 2027 sebesar Rp50 miliar, tahun 2028 Rp50 miliar dan Rp49,712 miliar di tahun 2029," ungkapnya.

Adapun penyertaan modal berupa aset non-kas meliputi tanah dan bangunan di Jalan Siswa 1, Kelurahan Suka Asih, serta Jalan Dewi Sartika Nomor 2, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. "Nilai aset Rp13,788 miliar tersebut mengacu pada hasil appraisal independen," jelas Andra. Perubahan Perda penyertaan modal tersebut, seiring perubahan bentuk hukum perusahaan serta penetapan modal dasar Jamkrida Banten yang dipatok menjadi Rp220 miliar. Hingga saat ini, modal disetor Pemprov Banten baru tercatat sebesar Rp51 miliar.

Andra menegaskan, tambahan investasi dari APBD tidak boleh dipandang sebagai bantuan cuma-cuma tanpa tolok ukur. "Penyertaan modal daerah tidak hanya dimaknai sebagai penambahan investasi pemerintah daerah, tetapi harus menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata, terukur, dan berkelanjutan," pungkas Andra.



Korupsi PT ABM Banten Rp 6,82 Miliar Sentuh Mitra Usaha

Bagaimana dengan Internal?



Tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) di Kejati Banten. (Dok)

TOTAL BANTEN - Penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi kerja sama perdagangan kebutuhan pokok di PT Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) atau PT ABM menyisakan pertanyaan mengenai pengawasan internal perusahaan milik Pemerintah Provinsi Banten tersebut.

Kejaksaan Tinggi Banten mengungkap dugaan penyimpangan dalam kerja sama perdagangan periode 2020–2024 yang menyebabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 6,82 miliar.

Dari tiga tersangka yang ditetapkan, satu merupakan mantan pejabat internal PT ABM, sedangkan dua lainnya merupakan mitra usaha. Ketiga tersangka itu berinisial TB.M, mantan Kepala Divisi Sales and Marketing PT ABM, serta A.S alias Dre dan A.N yang menjadi mitra dagang perusahaan daerah tersebut. Kepala Seksi Penyidikan Kejati Banten Devitra mengatakan, kerugian dalam perkara itu mencapai Rp 6.821.111.500 berdasarkan hasil penghitungan Inspektorat Provinsi Banten. “Kerugian berdasarkan hasil penghitungan Inspektorat Provinsi Banten itu Rp 6 miliar 821 juta 111 ribu 500 rupiah,” kata Devitra, Kamis (29/10/2026). Penyidik mendalami kerja sama perdagangan sejumlah kebutuhan pokok, antara lain minyak goreng, gula, dan tepung. Dalam transaksi tersebut, penyidik menemukan indikasi penyimpangan terkait penggunaan identitas pribadi dan sejumlah perusahaan yang diduga hanya digunakan sebagai sarana transaksi.

Menurut Devitra, beberapa perusahaan yang digunakan dalam kerja sama itu terindikasi bukan milik pihak yang bersangkutan. “Kadang memakai nama pribadi dan ada juga memakai beberapa perusahaan yang terindikasi atau dalam fakta kami temukan itu bodong atau dipakai. Perusahaan-perusahaan yang dipakai itu malah kami temukan fakta bukan merupakan milik yang bersangkutan,” ujarnya. Persoalan lainnya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran dalam kerja sama perdagangan. Transaksi yang semestinya menghasilkan keuntungan bagi PT ABM diduga justru membebani keuangan perusahaan karena sejumlah kewajiban tidak dipenuhi. “Harusnya melaksanakan proses bisnis yang benar, tetapi kenyataannya proses bisnis yang benar itu tidak dilakukan oleh mereka,” kata Devitra. Temuan tersebut menempatkan pelaksanaan kerja sama perdagangan dan pengawasan internal PT ABM sebagai bagian penting dalam pengungkapan perkara.

Sebagai badan usaha milik daerah, PT ABM menjalankan kegiatan usaha dengan aset dan kepentingan ekonomi yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Banten. Namun, penetapan tersangka dalam perkara ini belum dengan sendirinya menjelaskan bagaimana mekanisme persetujuan transaksi dijalankan, siapa yang mengawasi pemenuhan kewajiban mitra, serta sejauh mana sistem pengendalian internal bekerja selama periode kerja sama tersebut.

Kejati Banten belum memberikan kepastian mengenai kemungkinan adanya tersangka tambahan. Devitra mengatakan, penyidik masih mendalami perkara berdasarkan fakta yang ditemukan selama proses penyidikan.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 dan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Kamis, penyidik memeriksa A.S alias Dre sebagai tersangka. Sementara itu, TB.M yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada hari yang sama tidak hadir dengan alasan berhalangan dan telah menyampaikan surat kepada penyidik. Kejati Banten akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap tersangka yang belum hadir serta memanggil tersangka lain yang berdomisili di luar Provinsi Banten. Penyidik juga menelusuri aliran uang dan aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Pelacakan dilakukan bersama bidang aset dan intelijen Kejati Banten untuk mengidentifikasi kemungkinan harta kekayaan yang berhubungan dengan dugaan korupsi. “Tim kita lagi bekerja juga dengan bidang aset. Teman-teman di intelijen juga sedang melakukan pelacakan aset. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa telusuri ke mana aliran uangnya dan aset-aset apa yang dimiliki para tersangka,” ujar Devitra.

Devitra turut menyebut A.S sedang menjalani proses hukum dalam perkara pidana umum lainnya. Menurut dia, penahanan terhadap A.S saat ini berkaitan dengan perkara tersebut, bukan penahanan baru dalam perkara dugaan korupsi PT ABM. Penelusuran aliran dana menjadi salah satu langkah untuk mengungkap lebih jauh rangkaian transaksi yang menyebabkan kerugian keuangan daerah. Di sisi lain, perkembangan penyidikan juga akan menentukan apakah terdapat pihak lain yang harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Hingga kini, Kejati Banten masih mendalami peran masing-masing tersangka, rangkaian transaksi perdagangan selama 2020–2024, dan aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Adapun sejauh mana dugaan penyimpangan itu berkaitan dengan kelemahan pengawasan internal perusahaan masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari hasil penyidikan. ***(Dir/Red)***



RSDP Kabupaten Serang Perkuat Mutu Pelayanan Melalui Forum Konsultasi Publik

TOTAL BANTEN - Rumah Sakit Dradjat Prawiranegara (RSDP) Kabupaten Serang memperkuat mutu pelayanan kesehatan lewat Forum Konsultasi Publik dan Sosialisasi Tarif Layanan Kesehatan di Aula Hasanudin dr. Dradjat Prawiranegara, Kamis (29/10/2026).

Forum konsultasi publik merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan RSDP Kabupaten Serang, namun dalam waktu dua tahun ke belakang agenda ini tidak dilaksanakan karena ada beberapa faktor. Rachmat Setiadi, Direktur RSDP Kabupaten Serang mengatakan konsultasi publik merupakan agenda tahunan yang sering dilaksanakan.

"Forum komunikasi publik merupakan suatu dialog di mana rumah sakit Dradjat biasanya melakukan konsultasi publik setiap tahunnya dan beberapa tahun terakhir ini memang kita tidak mengadakan karena satu dan lain hal serta kebutuhan serta adanya efisiensi anggaran yang baik kita cermati bagaimana kita melakukan komunikasi publik ini tidak berlangsung tahun kemarin," kata Rachmat.

Menurutnya agenda forum konsultasi tersebut sangat berpengaruh terhadap arah strategis dan rencana kerja RSDP Kabupaten Serang ke depan. "Di mana arah strategis dan rencana kerja Rumah Sakit Dradjat salah satunya adalah masukan-masukan yang didapat dari konsultasi publik. Pertama adalah bagaimana kita harus meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit Dradjat. Ini penting buat kita. Lalu juga perawatan kita di rumah sakit Dradjat, kedua adalah penguatan layanan dan rujukan regional," tuturnya. Dalam meningkatkan mutu pelayanan tersebut, ia mengungkapkan telah membuat langkah strategis menambahkan ruangan agar pelayanan sesuai dengan kepuasan masyarakat. "Langkah strategisnya yang pertama adalah kita membuat layanan rawat inap. Yang paling penting itu, kita melakukan karena sekarang kita sudah menambah layanan. Layanan rawat di bulan kemarin itu 310, di bulan Juli Agustus nah kita menambahkan di 390 untuk masyarakat yang membutuhkan perawatan, " ujarnya. Disamping itu, ia juga turut menambah ruangan darurat khususnya untuk layanan ICU dan PICU.

"Nah, begitupun dengan layanan ICU dan PICU terutama kita mengadakan PICU empat, lalu ICU juga empat, ini untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan. Nah, ternyata setelah kita membuka di bulan Juli secara resmi oleh Ibu Bupati, langsung penuh. Ini menjadi PR lagi buat kita untuk menambah layanan untuk rawat inap," ujarnya. Selain dari forum konsultasi tersebut, ia mengatakan akan melakukan sosialisasi mengingat beberapa tahun kebelakang hingga tahun 2013 tidak mengalami kenaikan dalam tarif pendapatan. "Selain itu kita sosialisasikan. Beberapa tahun terakhir dari tahun 2013 kita tidak mengalami kenaikan kita coba sosialisasikan bagaimana ada tarif perubahan-perubahan tarif. Baik itu dari tahun 2015 sampai tahun 2023, tahun 2023 sampai 2026," tuturnya. Ia menegaskan semua tarifan tersebut disesuaikan dengan kepentingan pemerintah kabupaten Serang. "Kita menyesuaikan tarif-tarif pun berdasarkan kepentingan-kepentingan," ujarnya. Pemda Kabupaten Serang, kepentingan-kepentingan juga di Kota Serang, serta dari kabupaten rujukan yang kita ampu," Kata Rachmat.

Ia berharap forum konsultasi publik ini membawa keberkahan dan dapat menyelesaikan persoalan yang berbaur pelayanan. "Mudah-mudahan forum komunikasi ini selalu membawakan keberkahan dan semua atas segala masalah supaya kita bisa melayani dan bisa memfasilitasi masyarakat Kabupaten Serang, terutama Banten Barat, dari Kota Tangerang, Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Rangkas, dan Kota Serang bisa difasilitasi juga oleh Rumah Sakit Dradjat Prawiranegara," pungkasnya.

Sementara, Neneng Nurhasanah, Wakil direktur administrasi dan keuangan, sekaligus Ketua Panitia menyampaikan bahwa forum konsultasi publik di latarbelakangi oleh kebijakan dan standar pelayanan. "Saya selaku ketua panitia penyelenggara menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan forum konsultasi publik ini di Merupakan upaya untuk menyelaraskan kebijakan dan standar pelayanan dengan harapan kebutuhan serta masukan masyarakat atau pengguna layanan," kata Neneng.

Selain itu, ia juga mengungkapkan kebijakan penyusunan tarif pelayanan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Kemudian mensosialisasikan kebijakan penyusunan tarif pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku dan merumuskan masukan dan tindak lanjut untuk mendukung peningkatan mutu layanan dan penyempurnaan perencanaan Rumah Sakit Dr. Dradjat Prawiranegara," tambahnya.

Adapun dasar yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini pertama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ia berharap kegiatan ini mendapat masukan yg terarah dari berbagai elemen dan audiens yang menghadiri kegiatan tersebut. "Mengharapkan masukan yang terarah mengenai rencana pengembangan layanan dan informasi tarif layanan kesehatan sehingga kebijakan yang disusun semakin responsif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, " Pungkasnya. **(ADV)**

Kawal Arah Pembangunan 2027

DPRD Banten Mulai Bedah Raperda APBD



Rapat Paripurna DPRD Banten.

TOTAL BANTEN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027**.** Pembahasan ini menjadi tahapan penting dalam mengawal arah kebijakan anggaran agar selaras dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Pembahasan diawali melalui rapat paripurna dengan agenda penjelasan Gubernur Banten di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banten, Selasa (6/10/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budi Wibowo, didampingi Wakil Ketua DPRD Barhum HS, Imron Rosadi, dan Eko Susilo. Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi bersama jajaran Pemerintah Provinsi Banten.

Dalam rapat tersebut, Deden menyampaikan nota pengantar Gubernur mengenai Raperda APBD 2027.

Penyusunan rancangan anggaran mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati Gubernur bersama pimpinan DPRD. Tahapan ini menjadi ruang bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk mencermati arah kebijakan fiskal yang akan menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Banten pada tahun mendatang.

Bagi DPRD, pembahasan APBD tidak hanya berkaitan dengan penyusunan angka pendapatan dan belanja. Proses tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi penganggaran untuk memastikan rencana pembangunan disusun berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan. Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budi Wibowo mengatakan, rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan Gubernur akan dikaji dan dicermati oleh fraksi-fraksi sebelum pembahasan berlanjut ke tahapan berikutnya. “Raperda tentang APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2027 yang telah disampaikan selanjutnya akan dikaji dan dicermati sebagai bahan pembahasan bagi fraksi-fraksi untuk menyusun pandangan umum fraksi yang akan disampaikan pada rapat paripurna berikutnya,” ujar Yudi.

Melalui mekanisme tersebut, setiap fraksi memiliki ruang untuk menelaah substansi rancangan anggaran dan menyampaikan pandangannya secara kelembagaan. Hasil pembahasan selanjutnya menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan sesuai mekanisme yang berlaku. Dalam nota pengantar Gubernur, arah pembangunan Banten pada 2027 difokuskan pada peningkatan daya saing sumber daya manusia yang berintegritas, penguatan integrasi ekonomi domestik dan global, serta percepatan pertumbuhan ekonomi



Tanjung Lesung

Kawasan wisata Tanjung Lesung, menawarkan pesona alam pesisir yang memikat di Kabupaten Pandeglang, Banten. Hamparan pasir putih, air laut yang jernih, serta deretan pepohonan hijau menciptakan panorama tropis yang cocok untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari.

. Bentang pantainya yang luas berpadu dengan pemandangan laut lepas dan suasana pesisir yang menenangkan. Pengunjung dapat menikmati semilir angin laut, berjalan menyusuri pantai, atau duduk bersantai sambil menyaksikan ombak yang bergulung perlahan menuju tepian.

Keindahan alam tersebut menjadikan Tanjung Lesung sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Banten. Beragam aktivitas dapat dilakukan, mulai dari bermain pasir, berenang di area yang aman, menikmati pemandangan laut, hingga mencoba aktivitas wisata bahari sesuai kondisi cuaca dan ketersediaan layanan.

Pesona Tanjung Lesung semakin terasa ketika matahari mulai terbit atau menjelang senja. Cahaya keemasan yang menyentuh permukaan laut menghadirkan panorama yang indah, menciptakan suasana romantis sekaligus menenangkan bagi wisatawan yang ingin mengabadikan momen liburan.

Pantai Bugel Camara

Pantai Bugel Camara di Kabupaten Pandeglang, Banten, menawarkan pengalaman berkemah di tepi laut dengan suasana alam yang menenangkan. Hamparan pantai, semilir angin laut, serta pepohonan di sekitar kawasan menghadirkan suasana yang cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati liburan lebih dekat dengan alam.

Berkemah di kawasan ini memberikan kesempatan untuk merasakan suasana pantai sejak pagi hingga malam hari. Pengunjung dapat mendirikan tenda di area yang diperbolehkan, menikmati deburan ombak, hingga menghabiskan waktu bersama keluarga dan sahabat di bawah langit terbuka.

Saat sore menjelang, panorama matahari terbenam menjadi salah satu momen yang menarik untuk dinikmati. Cahaya jingga yang perlahan menyentuh cakrawala berpadu dengan hamparan laut, menciptakan pemandangan yang memikat untuk diabadikan melalui kamera.

Ketika malam tiba, suasana pantai terasa berbeda. Udara pesisir, suara ombak, dan langit malam menghadirkan pengalaman berkemah yang jauh dari keramaian perkotaan. Pengunjung dapat berkumpul di sekitar tenda, berbincang, atau sekadar menikmati suasana alam bersama orang-orang terdekat.





WISATA

Pulau Sangiang

Pulau Sangiang adalah sebuah permata tersembunyi yang terletak di Selat Sunda, berada tepat di antara Pulau Jawa dan Sumatra. Secara administratif, pulau yang indah ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kawasan ini awalnya ditetapkan sebagai Cagar Alam, tetapi seiring berjalannya waktu, fungsinya diubah menjadi Taman Wisata Alam guna mendukung konservasi sekaligus memungkinkan eksplorasi keindahan alamnya secara terbatas dan berkesinambungan. Letaknya yang relatif dekat dengan kawasan Banten dan Jabodetabek menjadikan Pulau Sangiang pilihan destinasi bahari yang menarik bagi para wisatawan yang mendambakan suasana alam yang masih asri dan tenang, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan.

Daya tarik utama Pulau Sangiang terletak pada kekayaan biota laut serta panorama alam daratannya yang menakjubkan. Perairan di sekitar pulau ini dikenal sangat jernih dengan ekosistem terumbu karang yang terawat, menjadikannya lokasi favorit untuk aktivitas snorkeling dan penyelaman. Di bawah permukaan laut, para penyelam dapat menyaksikan keanekaragaman ikan tropis dan terumbu karang yang memukau. Selain keindahan bawah lautnya, garis pantai di pulau ini menawarkan pemandangan hamparan pasir putih yang memikat, dipadukan dengan hembusan angin sepoi-sepoi dan gemuruh ombak Selat Sunda yang menenangkan jiwa. Tidak hanya menyajikan keindahan bahari, daratan Pulau Sangiang juga menyimpan potensi wisata petualangan dan sejarah yang kental. Wilayah pedalaman pulau ini didominasi oleh hutan tropis yang hijau dan rindang, sangat cocok untuk kegiatan penjelajahan atau jelajah alam. Salah satu lokasi unik yang sering dikunjungi adalah Goa Kelelawar, sebuah gua alami di mana pengunjung dapat menyaksikan ribuan kelelawar serta fenomena ombak laut yang sesekali menerjang masuk ke dalam celah gua. Dari segi sejarah, pulau ini menyimpan peninggalan masa lalu berupa benteng dan bunker pertahanan kuno yang dibangun oleh tentara Jepang pada era Perang Dunia II, memberikan wawasan tersendiri bagi pengunjung yang menyukai sejarah.

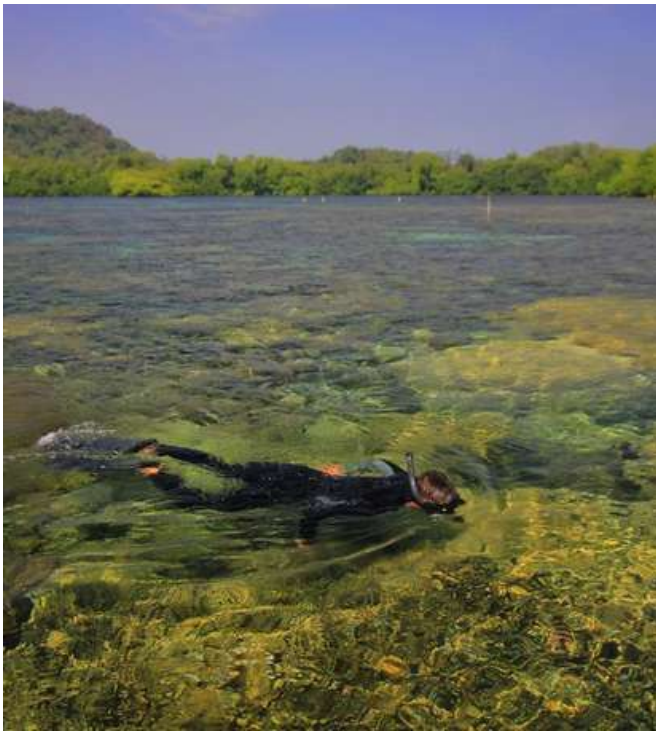



Bagi para pencinta fotografi dan penikmat lanskap alam, Pulau Sangiang menawarkan beberapa titik pandang strategis di atas tebing atau bukit kecil. Dari titik-titik ketinggian ini, pengunjung disuguhi panorama laut lepas Selat Sunda yang membentang luas serta pemandangan matahari terbit maupun matahari terbenam yang mempesona. Keberadaan puncak-puncak bukit ini menambah variasi pengalaman berkunjung, sehingga wisatawan tidak hanya disuguhkan kegiatan pantai, tetapi juga pemandangan alam dari ketinggian yang sangat memanjakan mata.

BOX Redaksi
Pimpinan Perusahaan : Engkos Kosasih, **Pemimpin Redaksi**: Andre SN, **Redaktur Pelaksana :** Agus Lani **Redaktur** : Imam Maulana, Hasanudin, Fariz, **Reporter :** D. Amanda, Saepul Aripin (Ipung), Dirhat, Andre Sopian, Abdul Majid, Muhammad Lutfi, Hendra Wibisana, Wawan Kurniawan, **Desain Grafis :** PT Banten Media Network

Penerbit : PT Raya Media Investama **Bisnis : PT Cula Satu Network**

Komplek Perumahan Citra Gading Blok Q4 nomor 3, Kelurahan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten
Kontak : Tlp/WA : 087854473555/ Email : totalbanten@gmail.com



Gugatan Perpanjangan Jabatan Sekda Tangsel

Feri Amsari: Warga Berhak Menggugat

Pakar hukum tata negara, Feri Amsari (Dok)

TOTAL BANTEN - Kedudukan hukum warga negara untuk menggugat keputusan pejabat publik menjadi salah satu pokok dalam sidang gugatan perpanjangan masa jabatan Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, Bambang Noertjahjo, Kamis (22/10/2026). Pakar hukum tata negara Feri Amsari yang dihadirkan sebagai saksi ahli oleh pihak penggugat menilai warga berhak mempertanyakan tindakan penyelenggara negara yang dianggap keliru.

Sidang lanjutan gugatan terhadap Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang itu mengagendakan pemeriksaan saksi ahli dari pihak penggugat dan tergugat, khususnya terkait legal standing atau kedudukan hukum penggugat dalam perkara tersebut. Feri dihadirkan oleh pihak penggugat, Suhendar dan Amizar, yang merupakan pengurus Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Tangerang Selatan. Seusai persidangan, Feri menyoroti hak warga negara untuk mempersoalkan kebijakan dan tindakan penyelenggara negara yang berdampak pada masyarakat. Menurut dia, warga tidak semestinya kehilangan ruang untuk mempertanyakan tindakan pejabat publik yang dinilai salah. "Sederhana saja, warga negara kan terdampak dengan berbagai kebijakan dan tindakan penyelenggara negara. Masa kita tidak diperbolehkan untuk mempertanyakan tindakan-tindakan yang salah," ujar Feri. Selain persoalan kedudukan hukum penggugat, Feri menjelaskan konsekuensi yang dapat timbul apabila gugatan tersebut dikabulkan oleh pengadilan. Menurutnya, keputusan tata usaha negara yang dinyatakan tidak sah atau batal harus diperbaiki sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. "Ya tentu kalau kemudian peradilan menyatakan keputusannya tidak sah atau batal, atau batal demi hukum, dia harus memperbaiki keputusan tata usaha negaranya sebaik-baiknya. Dan tentu seluruh tahapan prosedural harus dilakukan," katanya. Feri juga menekankan pentingnya proses pengisian jabatan yang terbuka dan kompetitif. Keterbukaan, menurut dia, diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui tahapan yang ditempuh dalam proses tersebut. “Kan ada ruang terbuka dan kompetitif ya, tentu tidak boleh tunggal, namanya kompetisi, masa tunggal ya. Lalu terbuka harus disampaikan kepada publik dan publik tahu tahapannya ada," ujar Feri.

Sementara itu, perwakilan penggugat, Muhammad Khoerul Umam, mengatakan persidangan akan berlanjut ke agenda penyampaian kesimpulan dari masing-masing pihak pada 5 November 2026. Adapun pembacaan putusan dijadwalkan pada 19 November 2026. "Untuk tahapan proses selanjutnya itu adalah agenda kesimpulan dari para pihak tanggal 5 November, setelah itu adalah putusan tanggal 19 November. Seluruh proses tersebut disampaikan melalui e-court," kata Khoerul Umam. ***(Eks/Red)***



ESAI

Paradoks Banten

Industri Numpuk, Kemiskinan Tinggi, Fiskal Melemah

Penulis : Founder Total Banten, Engkos Kosasih

TOTAL BANTEN - Banten menyimpan sebuah paradoks pembangunan yang tidak bisa dibaca hanya melalui angka pertumbuhan ekonomi. Provinsi ini berada di salah satu simpul ekonomi nasional, memiliki kawasan industri besar, menjadi pintu masuk perdagangan Pulau Jawa dan berada di sekitar pusat ekonomi Jakarta. Aktivitas manufaktur berkembang dari skala mikro hingga industri besar, sementara investasi dan pembangunan infrastruktur terus bergerak.

Basis industrinya pun tidak kecil. Data Badan Pusat Statistik mencatat sedikitnya 99.726 usaha industri mikro dan kecil berada di Banten. Jumlah tersebut terdiri dari 93.834 industri mikro dan 5.892 industri kecil. Angka itu belum memasukkan industri menengah dan besar yang terkonsentrasi di sejumlah kawasan industri di Tangerang Raya, Serang dan Cilegon. Dengan basis industri sebesar itu, Banten sesungguhnya bukan daerah yang kekurangan aktivitas ekonomi.

Namun geliat industri tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan hilangnya kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, pada September 2025 jumlah penduduk miskin di Banten masih mencapai 760,85 ribu orang atau 5,51 persen dari total penduduk. Angka tersebut memang menurun dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan itu patut dicatat sebagai perkembangan positif.

Namun, angka statistik tidak boleh menutupi kenyataan bahwa lebih dari tiga perempat juta warga masih hidup di bawah garis kemiskinan. Di sinilah pembangunan Banten perlu dibaca secara lebih kritis. Pertumbuhan ekonomi dan banyaknya aktivitas industri tidak otomatis menghasilkan pemerataan kesejahteraan. Industri dapat tumbuh, investasi dapat masuk dan produksi dapat meningkat, tetapi manfaat ekonomi tidak selalu mengalir secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

Data kemiskinan BPS juga memperlihatkan persoalan lain. Pada September 2025, tingkat kemiskinan di perkotaan tercatat 5,35 persen, sedangkan di perdesaan mencapai 6,27 persen. Ketika kemiskinan di perkotaan mengalami penurunan, persentase kemiskinan di perdesaan justru meningkat dibandingkan Maret 2025. Artinya, penurunan angka kemiskinan secara agregat belum tentu menggambarkan perbaikan yang sama di seluruh wilayah. Banten masih menghadapi perbedaan karakter pembangunan antara kawasan industri dan perkotaan dengan wilayah perdesaan yang sebagian ekonominya masih bergantung pada sektor pertanian, perikanan dan aktivitas ekonomi berproduktivitas rendah.

Kondisi tersebut seharusnya menjadi dasar dalam membaca kebijakan anggaran daerah.

Sebab, di tengah potensi industri yang besar, kemampuan pemerintah mengatasi kemiskinan sangat ditentukan oleh bagaimana sumber daya publik digunakan untuk menjembatani kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada 2025, Pemerintah Provinsi Banten masih memiliki ruang fiskal yang relatif besar.

Pendapatan daerah dalam APBD 2025 ditetapkan sekitar Rp11,83 triliun dengan belanja sekitar Rp11,84 triliun. Postur tersebut menunjukkan kapasitas pemerintah daerah untuk membiayai pelayanan publik dan program pembangunan dalam skala besar.

Namun, besarnya anggaran tidak dengan sendirinya menjamin perubahan sosial. APBD hanya menjadi angka di atas dokumen apabila tidak memiliki hubungan yang jelas dengan persoalan yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks kemiskinan, yang harus dilihat bukan hanya berapa besar anggaran bantuan sosial. Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dibebankan kepada satu jenis belanja atau satu organisasi perangkat daerah. Kemiskinan memiliki akar yang lebih kompleks, mulai dari rendahnya pendidikan, terbatasnya akses pekerjaan, produktivitas ekonomi yang rendah, ketimpangan akses pelayanan dasar hingga kerentanan rumah tangga menghadapi tekanan ekonomi.

Karena itu, APBD seharusnya bekerja secara lintas sektor. Anggaran pendidikan harus membantu memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Anggaran kesehatan harus mencegah keluarga jatuh miskin akibat beban pengobatan. Belanja infrastruktur harus membuka akses terhadap pusat ekonomi. rogram ketenagakerjaan harus mempertemukan keterampilan masyarakat dengan kebutuhan dunia kerja. Sementara belanja pertanian, perikanan dan pemberdayaan usaha harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Di tengah basis industri yang besar, persoalan ketenagakerjaan menjadi salah satu titik yang harus mendapat perhatian. Banten tidak cukup hanya membangun atau menarik industri. Pertanyaan yang lebih penting adalah sejauh mana industri tersebut membuka mobilitas ekonomi bagi masyarakat lokal.

Apakah tenaga kerja Banten memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri? Apakah lulusan sekolah dan perguruan tinggi dapat terserap oleh dunia kerja? Apakah industri besar menciptakan rantai pasok yang dapat dimasuki UMKM lokal? Ataukah pertumbuhan industri justru berjalan dalam ekosistem yang terpisah dari masyarakat di sekitarnya?

Persoalan inilah yang membuat jumlah industri tidak dapat langsung diterjemahkan sebagai ukuran kesejahteraan. Industri dapat tumbuh, tetapi jika penyerapan tenaga kerja tidak optimal dan nilai tambah ekonomi tidak berputar di tingkat lokal, maka pertumbuhan hanya terkonsentrasi pada pusat-pusat tertentu. Di sinilah APBD memiliki fungsi yang tidak dapat digantikan oleh investasi swasta. Pemerintah memang tidak dapat mengendalikan seluruh keputusan bisnis, tetapi pemerintah dapat menggunakan anggaran publik untuk mempersiapkan masyarakat agar mampu masuk ke dalam arus pertumbuhan. Pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri. Infrastruktur dapat membuka akses ekonomi. Program pemberdayaan dapat meningkatkan kapasitas usaha kecil. Sementara perlindungan sosial dapat menjaga kelompok rentan agar tidak semakin terpuruk ketika menghadapi tekanan ekonomi.

Persoalannya kemudian bukan hanya berapa besar APBD, tetapi bagaimana kualitas belanjanya. Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika Banten memasuki tahun anggaran 2026 dengan ruang fiskal yang lebih terbatas.

Dinamika APBD Banten

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika Banten memasuki tahun anggaran 2026 dengan ruang fiskal yang lebih terbatas. Dalam APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp10,08 triliun, lebih rendah dibandingkan postur APBD 2025. PAD menjadi sumber utama pendapatan dengan target Rp7,49 triliun. Dari jumlah tersebut, pajak daerah menjadi penyumbang terbesar sebesar Rp6,81 triliun, sedangkan pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp2,58 triliun.

Belanja daerah pada APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp10,04 triliun. Belanja operasi mengambil porsi terbesar sebesar Rp7,22 triliun. Di dalamnya terdapat belanja barang dan jasa Rp3,47 triliun. Belanja modal dialokasikan Rp804,09 miliar, belanja hibah Rp620,75 miliar dan belanja bantuan sosial Rp18,61 miliar. Selain itu, belanja transfer mencapai Rp1,96 triliun.

Struktur tersebut menunjukkan bahwa perubahan kapasitas fiskal mulai menjadi tantangan bagi Banten. Ketika pendapatan daerah mengalami penurunan, pemerintah tidak lagi memiliki ruang yang sama untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan. Dalam situasi seperti itu, kualitas perencanaan menjadi jauh lebih penting daripada sekadar besarnya anggaran.

Pemerintah harus mampu membedakan antara belanja yang bersifat rutin dengan belanja yang benar-benar menghasilkan dampak.

Efisiensi anggaran tidak cukup dilakukan dengan memangkas angka. Yang lebih penting adalah memastikan uang yang tersedia diarahkan kepada program yang memberikan manfaat paling besar bagi masyarakat. Kemiskinan seharusnya menjadi salah satu ukuran dalam menentukan prioritas tersebut.

Dengan jumlah penduduk miskin mencapai 760,85 ribu orang, setiap kebijakan anggaran perlu memiliki hubungan yang jelas dengan upaya memperluas kesempatan ekonomi dan mengurangi kerentanan masyarakat. Tidak semua program harus diberi label penanggulangan kemiskinan, tetapi setiap belanja pembangunan harus dapat diuji dampaknya terhadap kesejahteraan.

Di sinilah kelemahan klasik pengelolaan anggaran pemerintah sering muncul. Keberhasilan masih terlalu sering diukur berdasarkan serapan anggaran dan penyelesaian kegiatan. Padahal serapan hanya menunjukkan bahwa uang telah dibelanjakan. Kegiatan yang selesai hanya menunjukkan program telah dilaksanakan. Keduanya belum menjawab apakah kehidupan masyarakat berubah.

Pelatihan kerja, misalnya, tidak cukup dinilai dari jumlah peserta. Ukuran yang lebih penting adalah berapa peserta yang memperoleh pekerjaan. Bantuan kepada pelaku usaha tidak cukup diukur dari jumlah penerima, tetapi apakah pendapatan dan produktivitas mereka meningkat. Pembangunan infrastruktur juga tidak cukup diukur berdasarkan volume pekerjaan, melainkan dampaknya terhadap akses dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Perubahan cara pandang inilah yang seharusnya menjadi dasar dalam menyusun anggaran berikutnya. Banten kini memasuki tahapan penyusunan APBD 2027 melalui KUA-PPAS. Dokumen tersebut menjadi penting karena disusun ketika ruang fiskal kembali menghadapi tekanan. Proyeksi pendapatan daerah dalam KUA-PPAS 2027 berada di kisaran Rp9,33 triliun atau turun sekitar Rp751,15 miliar dibandingkan target pendapatan APBD 2026 sebesar Rp10,08 triliun.

Jika dibandingkan secara berurutan, kapasitas pendapatan Banten menunjukkan tren penurunan. Dari sekitar Rp11,83 triliun dalam APBD 2025, turun menjadi Rp10,08 triliun pada APBD 2026, kemudian diproyeksikan kembali turun menjadi sekitar Rp9,33 triliun dalam KUA-PPAS 2027. Tren tersebut harus menjadi perhatian serius. Penurunan ruang fiskal berarti pemerintah harus semakin ketat menentukan prioritas. Tidak seluruh keinginan pembangunan dapat dibiayai dalam waktu bersamaan. Pemerintah harus memilih program yang paling relevan, menghentikan kegiatan yang tidak efektif dan memastikan anggaran yang terbatas menghasilkan dampak yang terukur. Dalam KUA-PPAS 2027, Pemerintah Provinsi Banten mengarahkan pembangunan pada peningkatan daya saing sumber daya manusia yang berintegritas serta integrasi ekonomi domestik dan global. Arah tersebut memiliki relevansi kuat dengan persoalan kemiskinan. Namun keberhasilannya bergantung pada bagaimana tema tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan anggaran. Peningkatan daya saing sumber daya manusia tidak boleh hanya menjadi program bagi kelompok yang sejak awal telah memiliki akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja. Kelompok miskin dan rentan harus menjadi bagian dari agenda tersebut.

Sebab ketimpangan ekonomi sering kali berawal dari ketimpangan kesempatan. Anak dari keluarga miskin memiliki risiko lebih besar memperoleh pendidikan yang terbatas. Pendidikan yang rendah berpengaruh terhadap keterampilan. Keterampilan yang terbatas mempersempit akses terhadap pekerjaan produktif. Pendapatan yang rendah kemudian diwariskan kembali dalam bentuk keterbatasan kesempatan bagi generasi berikutnya. Siklus tersebut tidak dapat diputus hanya melalui bantuan jangka pendek. Dibutuhkan investasi jangka panjang pada manusia melalui pendidikan, kesehatan, keterampilan dan akses terhadap pekerjaan.

Di sisi lain, integrasi ekonomi domestik dan global juga harus diterjemahkan secara inklusif. Banten tidak cukup hanya menjadi lokasi masuknya investasi. Masyarakat lokal harus memiliki kemampuan untuk mengambil bagian dalam pertumbuhan tersebut. Banten memiliki modal ekonomi untuk mempercepat pengurangan kemiskinan. Industri tumbuh dari skala mikro hingga manufaktur besar. Investasi terus bergerak. Posisi geografisnya strategis. Kapasitas ekonomi tersebut seharusnya menjadi modal untuk menciptakan mobilitas sosial yang lebih luas. Namun modal ekonomi membutuhkan kebijakan publik yang mampu menghubungkan pertumbuhan dengan kesejahteraan. Di titik inilah APBD memiliki peran yang menentukan. Anggaran publik harus menjadi alat untuk memastikan masyarakat yang tertinggal dapat masuk ke dalam arus pembangunan. **(*)**



Lima Abad Banten; dari Kesultanan, Perebutan Ruang dan Arah Anggaran

"Lima abad setelah Banten berkembang sebagai pusat perdagangan di Selat Sunda, tantangannya memang berubah. Dulu persoalannya berkaitan dengan kekuasaan atas jalur perdagangan dan wilayah. Kini, tantangannya berada pada bagaimana pemerintah mengelola ruang yang semakin padat kepentingan dengan kemampuan fiskal yang terbatas."

TOTAL BANTEN - Banten memiliki sejarah panjang sebelum berdiri sebagai provinsi pada 4 Oktober 2000. Jauh sebelumnya, wilayah Banten telah berkembang di pesisir barat Pulau Jawa sebagai salah satu pusat kekuasaan dan perdagangan penting di kawasan Selat Sunda. Perubahan penting terjadi sekitar abad ke-16 ketika pengaruh Islam berkembang di wilayah Banten. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati memiliki peran dalam proses Islamisasi di wilayah yang kini di kenal sebagai Tanah Jawara.

Putranya, Maulana Hasanuddin ditempatkan sebagai tokoh penting dalam perkembangan awal Kesultanan Banten. Banten kemudian berkembang sebagai kesultanan dengan pusat pemerintahan dan perdagangan di kawasan Banten Lama. Letak geografis menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan Banten.

Posisi di sekitar Selat Sunda membuat wilayah ini terhubung dengan jalur perdagangan antarkawasan. Komoditas lada menjadi salah satu barang dagangan penting yang membuat pelabuhan Banten dikenal dalam jaringan perdagangan internasional.

Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, Banten berkembang sebagai salah satu kekuatan penting di wilayah barat Jawa. Hubungan dan konflik dengan VOC menjadi bagian dari sejarah politik Banten pada masa tersebut.

Konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji yang kemudian mendapat dukungan VOC turut melemahkan kekuasaan Kesultanan Banten. Memasuki masa kolonial, posisi Banten kembali mengalami perubahan. Kekuasaan kesultanan semakin terbatas dan kawasan Surosowan mengalami kerusakan dalam konflik politik. Pada periode berikutnya, wilayah Banten menjadi bagian dari struktur pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan Jalan Raya Pos yang menghubungkan Anyer hingga Panarukan pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels juga menjadi bagian dari sejarah Banten.

Anyer menjadi salah satu titik penting dalam jalur tersebut karena posisinya berada di bagian barat Pulau Jawa.
Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Banten menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Keinginan untuk membentuk pemerintahan daerah sendiri kemudian berkembang seiring perubahan politik dan tuntutan desentralisasi pada masa Reformasi.

Salah satu momentum penting terjadi pada 18 Juli 1999 ketika Deklarasi Rakyat Banten digelar di Alun-alun Serang. Gerakan pembentukan Provinsi Banten kemudian berkembang melalui proses politik dan kelembagaan.

Pemekaran Banten dari Jawa barat akhirnya mendapat persetujuan DPR RI. Pada 4 Oktober 2000, DPR RI menyetujui pembentukan Provinsi Banten. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari jadi Provinsi Banten. Secara hukum, pembentukan Provinsi Banten ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten yang diundangkan pada 17 Oktober 2000.

Provinsi Banten pada awal pembentukannya terdiri atas Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Pada 18 November 2000, Provinsi Banten diresmikan dan Hakamudin Djamal dilantik sebagai penjabat gubernur pertama. Dalam perjalanannya, Banten kemudian mengalami perubahan administrasi pemerintahan dengan terbentuknya Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan. Struktur wilayah tersebut berkembang menjadi kawasan dengan karakter yang beragam: metropolitan, industri, pertanian, pesisir, pariwisata hingga wilayah perdesaan. Dua puluh enam tahun setelah pembentukannya, persoalan Banten tidak lagi berkaitan dengan bagaimana membentuk sebuah provinsi.

Persoalannya bergeser pada bagaimana kewenangan pemerintahan yang telah dimiliki digunakan untuk mengatur ruang, mengelola sumber daya dan menentukan prioritas pembangunan. Salah satu dokumen penting untuk membaca arah tersebut adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2023–2043. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 menetapkan wilayah darat Banten sekitar 935.823 hektare dan wilayah perairan sekitar 943.158 hektare. RTRW tersebut menempatkan pengembangan pusat pertumbuhan dengan dukungan ketahanan sumber daya alam, industri dan pariwisata sebagai bagian dari arah penataan ruang Banten.

Namun luas wilayah bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat ruang yang harus dipertahankan, ruang yang dikembangkan dan ruang yang harus dikelola untuk berbagai kepentingan yang saling berhadapan. Dokumen RPJPD Provinsi Banten 2025–2045 yang merujuk RTRW 2023–2043 mencatat kawasan pertanian dalam pola ruang sekitar 380.398,611 hektare.

Dari jumlah tersebut, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) mencapai sekitar 123.216,46 hektare. Pada saat yang sama, sekitar 60.762 -



hektare dialokasikan sebagai Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Dua angka itu memperlihatkan salah satu persoalan utama Banten ke depan. Di satu sisi terdapat kebutuhan mempertahankan ruang pertanian dan pangan. Di sisi lain, terdapat agenda industrialisasi yang membutuhkan ruang, infrastruktur dan pelayanan pendukung.

Di antara keduanya terdapat permukiman, kawasan lindung, jaringan transportasi, pesisir, pariwisata dan berbagai kebutuhan pembangunan lainnya. Karena itu, tata ruang tidak berhenti pada peta. Ketika kawasan industri berkembang, pemerintah harus menyediakan atau mengatur kebutuhan jalan, transportasi, energi, air dan pelayanan publik.

Ketika lahan pertanian dipertahankan, dibutuhkan irigasi, jalan produksi, perlindungan lahan dan akses pasar. Sementara kawasan pesisir membutuhkan pengelolaan lingkungan serta perlindungan ekosistem.

Seluruh kebutuhan tersebut memiliki konsekuensi terhadap anggaran daerah. Di sinilah APBD menjadi penting untuk membaca Banten setelah 26 tahun menjadi provinsi.

Pada APBD 2026, total anggaran Provinsi Banten ditetapkan sekitar Rp10,27 triliun. Pendapatan daerah direncanakan Rp10,08 triliun, sedangkan belanja daerah sekitar Rp10,14 triliun. Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah atau PAD mencapai sekitar Rp7,49 triliun. Pajak daerah menyumbang sekitar Rp6,93 triliun. Sementara dari sisi belanja, sekitar Rp7,30 triliun dialokasikan untuk belanja operasi, Rp774,81 miliar untuk belanja modal, Rp52,02 miliar untuk belanja tidak terduga dan sekitar Rp2 triliun untuk belanja transfer.

Belanja untuk urusan wajib pelayanan dasar tercatat sekitar Rp5,89 triliun atau 58,18 persen dari struktur belanja yang disampaikan Pemerintah Provinsi Banten. Angka tersebut menunjukkan bahwa >>>



APBD bukan sekadar daftar pendapatan dan pengeluaran. Di dalamnya terdapat keputusan mengenai pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, transportasi, ekonomi dan berbagai kebutuhan masyarakat. Karena itu, struktur APBD perlu dibaca bersama dengan struktur ruang Banten. Ketika RTRW menyediakan sekitar 60.762 hektare untuk kawasan peruntukan industri, sementara kawasan pertanian dalam pola ruang mencapai sekitar 380 ribu hektare, pertanyaannya bukan hanya berapa luas ruang yang tersedia.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana ruang tersebut digunakan dan apakah anggaran pemerintah mengikuti konsekuensi dari pilihan tata ruang itu. Kawasan industri membutuhkan infrastruktur. Pertanian membutuhkan perlindungan dan dukungan produksi. Wilayah pesisir membutuhkan pengelolaan lingkungan.

Kawasan perkotaan membutuhkan transportasi, pengendalian banjir, air bersih, pengelolaan sampah dan pelayanan dasar. Semua pilihan ruang tersebut pada akhirnya berhubungan dengan perencanaan dan kemampuan fiskal. Kemampuan tersebut juga berubah dari tahun ke tahun. Pada 2025, pendapatan dan belanja daerah Banten ditetapkan sekitar Rp11,84 triliun Setahun kemudian, APBD 2026 berada di kisaran Rp10,27 triliun. Dalam pembahasan Perubahan KUA-PPAS 2026, pendapatan kembali disesuaikan menjadi sekitar Rp9,72 triliun dan belanja sekitar Rp9,62 triliun. Dengan kondisi tersebut, pembangunan Banten tidak cukup dibaca melalui pertumbuhan kawasan ekonomi atau jumlah proyek yang dibangun.

Kapasitas fiskal, struktur belanja dan distribusi anggaran menjadi bagian penting dalam melihat kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan setiap wilayah. Sementara itu, arah anggaran 2027 mulai dibahas melalui KUA-PPAS. Pemerintah Provinsi Banten menyebut peningkatan kualitas sumber daya manusia serta integrasi ekonomi domestik dan global sebagai tema pembangunan 2027.

Penyusunan anggaran tersebut juga memperhitungkan sejumlah belanja mandatori, termasuk anggaran pendidikan minimal 20 persen dan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen sesuai ketentuan yang menjadi rujukan pemerintah. Di titik ini, perjalanan Banten memasuki persoalan yang berbeda dari masa lalu. Dulu, posisi Banten di Selat Sunda menjadi modal perdagangan dan kekuasaan.

Kini, posisi geografis yang sama berhadapan dengan persoalan tata ruang, industrialisasi, perlindungan pertanian, pembangunan infrastruktur, lingkungan dan keterbatasan fiskal. Banten memiliki kawasan metropolitan di utara, kawasan industri di sejumlah wilayah, pertanian di bagian lain, serta pesisir dan pariwisata yang membentang dari Tangerang hingga Pandeglang dan Lebak.

Perbedaan karakter tersebut membuat kebutuhan pembangunan setiap wilayah tidak selalu sama. Karena itu, usia 26 tahun Provinsi Banten tidak cukup dibaca sebagai peringatan administratif. Ini menjadi momentum untuk melihat hubungan antara ruang yang direncanakan dan uang yang dibelanjakan.

RTRW menentukan bagaimana ruang Banten direncanakan dalam jangka panjang. APBD menentukan program dan belanja yang dibiayai pemerintah setiap tahun. Keduanya seharusnya bertemu dalam satu arah pembangunan. Jika ruang industri diperluas, harus terlihat bagaimana infrastruktur dan pelayanan pendukungnya dibiayai. Sehingga perlu dilihat secara utuh arah keberpihakan anggaran Pemprov Banten kemana. (Esai ditulis Engkos Kosasih)

Bruno Fernandes Dikritik, Ruang Ganti Manchester United Memanas Usai Dibantai Como

TOTAL BANTEN - Kekalahan telak Manchester United dari Como di Liga Champions memicu perdebatan mengenai taktik pelatih Michael Carrick dan kepemimpinan Bruno Fernandes sebagai kapten. Kritik terbuka Fernandes terhadap strategi tim berujung pada sorotan terhadap hubungan antara pemain dan pelatih. Manchester United takluk 1-4 dari Como di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Italia, Rabu (21/10/2026) malam waktu setempat. Hasil tersebut memperpanjang catatan tanpa kemenangan Setan Merah menjadi tujuh pertandingan di seluruh kompetisi, dengan tiga hasil imbang dan empat kekalahan.

Dalam pertandingan itu, Como unggul melalui dua gol Nico Paz, masing-masing pada menit kedua dan ke-57, serta gol Anastasios Douvikas pada menit ke-49 dan Jacobo Ramon pada menit ke-76. Manchester United hanya mampu membalas melalui Joshua Zirkzee pada masa tambahan waktu.

Kekalahan tersebut tidak hanya memperburuk hasil pertandingan Manchester United.

Pernyataan Fernandes seusai laga turut memunculkan perdebatan mengenai pendekatan taktik Carrick dan tanggung jawab para pemain dalam menjalankan strategi tim.

Dikutip dari laporan BBC Sport dan Sky Sports, Fernandes menilai Manchester United kurang memberikan tekanan kepada lawan dan membiarkan Como memperoleh terlalu banyak ruang untuk mengembangkan permainan.

"Keputusan staf untuk tidak melakukan pressing satu lawan satu dan terkadang membiarkan ruang di belakang merupakan bagian dari pendekatan yang digunakan," ujar Fernandes dalam wawancara seusai pertandingan, sebagaimana diberitakan media Inggris.

Fernandes juga menilai timnya kehilangan momentum setelah kebobolan pada awal pertandingan. Menurut dia, lawan memperoleh kepercayaan diri ketika Manchester United memberikan terlalu banyak ruang untuk menguasai bola.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena Fernandes merupakan kapten tim. Kritik yang disampaikan secara terbuka kepada pendekatan pelatih dinilai sebagian pengamat dapat memunculkan persoalan mengenai komunikasi internal dan kewibawaan manajer. Carrick merespons dengan menekankan bahwa persoalan Manchester United tidak semata-mata terletak pada pilihan taktik.

Menurut dia, para pemain tetap harus menunjukkan intensitas, disiplin, dan kemauan untuk bekerja keras ketika kehilangan bola. "Kami melakukan pressing satu lawan satu secara setengah-setengah pada babak kedua dan akhirnya kebobolan. Apa pun taktik yang digunakan, jika pemain tidak berlari kembali untuk bertahan, Anda tidak akan menang," kata Carrick, sebagaimana dikutip Sky Sports.

Pernyataan itu memperlihatkan perbedaan penekanan di antara keduanya. Fernandes menyoroti pendekatan permainan yang diterapkan staf pelatih, sedangkan Carrick menekankan pentingnya pelaksanaan strategi dan etos kerja pemain di lapangan. Perdebatan mengenai peran kapten Manchester United turut mendapat tanggapan dari mantan penyerang Watford, Troy Deeney. Dalam komentarnya kepada talkSPORT, Deeney mempertanyakan kemampuan Fernandes menjalankan fungsi kepemimpinan, terutama ketika kontribusinya dalam mencetak gol atau memberikan assist tidak terlihat.

"Bruno Fernandes seolah memberi amunisi bagi siapa saja untuk menyerangnya, seakan-akan dia bebas mengatakan apa saja," ujar Deeney, sebagaimana dikutip talkSPORT. Deeney juga menegaskan bahwa dirinya telah lama meragukan kepemimpinan Fernandes sebagai kapten. Menurut dia, peran kapten tidak semestinya hanya diukur dari kontribusi teknis berupa gol dan assist, tetapi juga dari cara pemain memimpin tim.

Kritik Deeney tersebut merupakan penilaian pribadi terhadap Fernandes, bukan keputusan resmi klub mengenai jabatan kapten. Hingga laporan BBC Sport pada Kamis (22/10/2026).



Edisi 57 | Oktober 2026

Total Banten
bicara data, bicara fakta

“

LIMA ABAD BANTEN

KESULTANAN, RUANG DAN ARAH ANGGARAN

Daerah ini memiliki sejarah panjang hingga menjadi Provinsi Banten pada tahun 2000, setelah memisahkan diri dari Jawa Barat. Jauh sebelum itu, Banten pernah menjadi pusat perdagangan di Selat Sunda.

www.totalbanten.com
@totalbanten